

BULETIN PEMBANGUNAN DAERAH

ISSN 2962-4045



Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Kota Bogor

Vol.5 No.2

Januari - Maret 2026
www.bapperidakotabogor.go.id
Instagram : @bapperida.kotabogor



DARI KOTA HUJAN MENUJU KOTA CERDAS
MENGALIRKAN INOVASI, MENUMBUHKAN EKONOMI



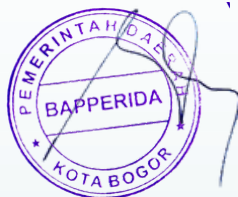
Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan semesta alam atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor bisa menyelesaikan penerbitan Buletin Pembangunan Daerah Vol.5 No.1. Shalawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Buletin Pembangunan Daerah ini merupakan edisi keempat yang diterbitkan sebagai sarana komunikasi dan publikasi informasi mengenai kegiatan pembangunan di Kota Bogor.

Akhirnya, kami mengharapkan semoga buletin ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor





Susunan Redaksi

PENGARAH

H. Denny Mulyadi, S.E.

PENANGGUNG JAWAB

Rudy Mashudi, S.T., MP

KETUA TIM REDAKSI

Irma Arlini Dewi, S.T.P., M.SC.

TIM REDAKSI

Lusi Nurbaiti Badri, S.T., M.Si

Erni Solikhati, S.E.

Imam Santoso, S.E., M.M.

Gandi Aria Wijaya, S.P., M.Si.

Nani Haryani

Fajar Tri Utama

Rahma Meiza Hernanda

DESIGN

Syiva Multi Fani, S.Stat.

SEKRETARIAT

Dwi Hari Wibowo, S.Kom.

MITRA BESTARI

- Dr. Eko Sakapurnama (Universitas Indonesia)
- Dr. Eka Suhardi (Universitas Pakuan)
- Ifan Muttaqien, SP, MIT (Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian)
- Mohamad Iksan Maolana, S.H., LL.M. (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
- Sheila Savitri, S.Sos, M.AP (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian)



<https://bapperida.kotabogor.go.id>



bapperida@kotabogor.go.id



[@bapperida.kotabogor](https://www.instagram.com/bapperida.kotabogor)

Daftar Isi

04

DARI TALAS HINGGA DIGITAL: TRANSFORMASI PRODUK UNGGULAN KOTA BOGOR SEBAGAI MOTOR EKONOMI LOKAL BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF RPJMD

Dr. Hengky Sumisto Halim, S.T., M.M. – LPPM, Politeknik Prasetiya Mandiri

15

ANALISIS DINAMIKA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN TRANSFER KE DAERAH (TKD) TERHADAP PDRB SEKTOR INDUSTRI KOTA BOGOR TAHUN 2016–2025

Julindi Diva Yanus – Universitas Negeri Semarang

22

MEMBANGUN KOTA HALAL BERBASIS SAINS: PELUANG INOVASI DAN KEUNGGULAN BOGOR DI ERA EKONOMI GLOBAL

Abdul Salam, S.E., S.Pd., M.Si. – Kecamatan Bogor Utara

30

STRATEGI PENGUATAN HILIRISASI PRODUK TALAS SEBAGAI PRODUK UNGGULAN DAERAH KOTA BOGOR

Arliyah – Bapperida Kabupaten Belitung Timur

36

DARI KOTA HUJAN KE KOTA CERDAS : IMPLEMENTASI SMART CITY KOTA BOGOR

Arliyah – Bapperida Kabupaten Belitung Timur

44

MENGAWAL TRANSPARANSI & PARTISIPASI PUBLIK ADVOKASI KEBIJAKAN MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM REVIEW DI KOTA BOGOR TAHUN 2026

Irma Arlini Dewi, S.T.P., M.Sc. – Bapperida Kota Bogor & Fuadi Hanif, S.Stat. – Kemendagri

Dari Talas hingga Digital: Transformasi Produk Unggulan Kota Bogor sebagai Motor Ekonomi Lokal Berkelanjutan dalam Perspektif RPJMD

■ Penulis : Dr. Hengky Sumisto Halim, S.T., M.M. - LPPM, Politeknik Prasetya Mandiri



Alun-Alun Kota Bogor. (Sumber: travel.kompas.com)

Transformasi produk unggulan daerah menjadi strategi kunci dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kota Bogor menunjukkan perkembangan signifikan dalam pengembangan produk unggulan berbasis UMKM melalui hilirisasi dan digitalisasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis transformasi tersebut dalam kaitannya dengan visi, misi, dan indikator kinerja RPJMD Kota Bogor, khususnya dalam penguatan ekonomi lokal, peningkatan daya saing, dan pembangunan inklusif. Metode yang digunakan adalah teknik analisis konten (content analysis) terhadap dokumen kebijakan dan statistik daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi sektor perdagangan, industri pengolahan, dan digitalisasi UMKM menjadi instrumen utama dalam mendukung pencapaian target RPJMD.

Kata kunci: RPJMD, produk unggulan daerah, UMKM, digitalisasi, ekonomi lokal

1. Pendahuluan

RPJMD Kota Bogor 2021–2026 menegaskan arah pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing ekonomi daerah. Visi pembangunan yang dirumuskan, yaitu:

“Terwujudnya Kota Bogor sebagai kota yang maju, nyaman, dan berkelanjutan” (RPJMD Kota Bogor 2021–2026),

dijabarkan ke dalam misi strategis, antara lain peningkatan daya saing ekonomi daerah, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pengembangan produk unggulan daerah menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Kementerian PPN/Bappenas, 2022; Porter, 1990).

Sejumlah studi telah mengkaji peran UMKM dalam pembangunan ekonomi lokal serta pentingnya produk unggulan daerah dalam meningkatkan daya saing (Tambunan, 2019; Blakely & Leigh, 2013).

Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek umum seperti peningkatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, dan pemasaran, serta belum secara spesifik mengaitkan transformasi produk unggulan dengan kerangka kebijakan pembangunan daerah, khususnya dokumen perencanaan strategis seperti RPJMD.

Di sisi lain, kajian mengenai digitalisasi UMKM umumnya menekankan aspek adopsi teknologi dan pemanfaatan platform digital (Brynjolfsson & McAfee, 2014; UNCTAD, 2021), tetapi belum banyak yang mengintegrasikan peran sektor ekonomi informal, seperti pedagang kaki lima (PKL), dalam dinamika transformasi ekonomi daerah. Padahal, sektor informal memiliki kontribusi signifikan dalam penciptaan lapangan kerja dan distribusi ekonomi lokal (Chen, 2012).

Lebih lanjut, terdapat keterbatasan studi yang mengaitkan secara empiris antara struktur ekonomi daerah berbasis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pengembangan produk unggulan sebagai bagian dari strategi hilirisasi ekonomi (Kaplinsky & Morris, 2001).

Keterkaitan antara sektor dominan dalam PDRB—seperti perdagangan dan industri pengolahan—dengan praktik pengembangan produk unggulan daerah masih belum banyak dikaji secara komprehensif.

Dengan demikian, belum terdapat kajian yang secara simultan mengintegrasikan produk unggulan daerah, struktur PDRB, digitalisasi, dan indikator RPJMD dalam satu kerangka analitis berbasis kebijakan daerah.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini menawarkan kontribusi dengan:

(1) mengintegrasikan analisis produk unggulan daerah dengan kerangka RPJMD Kota Bogor, (2) mengaitkan transformasi ekonomi lokal dengan struktur PDRB sektoral, serta (3) memasukkan peran UMKM dan PKL dalam konteks digitalisasi dan pembangunan inklusif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga relevansi praktis dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi produk unggulan daerah di Kota Bogor dalam kaitannya dengan struktur ekonomi, digitalisasi, dan pencapaian indikator kinerja RPJMD.

Pelaku UMKM Kota Bogor. (Sumber: dinamikanews.co.id)





Produk unggulan Kota Bogor. (Sumber: antarafoto.com)

2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Kebijakan

2.1 Produk Unggulan dalam Perspektif RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan selama periode lima tahun. Salah satu fokus utama dalam RPJMD adalah pengembangan produk unggulan daerah sebagai upaya meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Produk unggulan daerah merupakan produk yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif karena didukung oleh ketersediaan sumber daya lokal, keterampilan masyarakat, serta peluang pasar yang potensial. Melalui pengembangan produk unggulan, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta memperkuat identitas ekonomi daerah (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Dalam perspektif pembangunan ekonomi daerah, produk unggulan berfungsi sebagai penggerak utama (leading sector) yang mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap sektor ekonomi lainnya. Pengembangan produk unggulan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga mencakup penguatan rantai nilai (value chain), peningkatan kualitas produk, inovasi, akses pembiayaan, serta perluasan pasar.

Menurut Blakely dan Leigh (2013), pembangunan ekonomi lokal (Local Economic Development) menekankan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah secara optimal melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan daerah untuk mengembangkan keunggulan lokal menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi.

Selain memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pengembangan produk unggulan juga memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Produk unggulan yang dikelola secara efektif dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Oleh karena itu, RPJMD perlu memuat kebijakan yang mendukung pengembangan produk unggulan melalui penyediaan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan usaha, serta fasilitasi pemasaran dan digitalisasi produk. Dengan demikian, produk unggulan tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga sarana untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing (Todaro & Smith, 2020).

2.2 Keunggulan Kompetitif dan Hilirisasi

Keunggulan kompetitif merupakan kemampuan suatu daerah atau organisasi untuk menciptakan nilai yang lebih tinggi dibandingkan pesaing melalui pemanfaatan sumber daya, inovasi, kualitas produk, maupun strategi diferensiasi yang efektif. Dalam konteks pembangunan daerah, keunggulan kompetitif menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi lokal dan memperkuat posisi produk unggulan di pasar.

Porter (1990) menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif dapat dibangun melalui kemampuan menghasilkan produk yang unik, efisien, berkualitas tinggi, serta mampu memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih baik dibandingkan kompetitor. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan inovasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan ekosistem bisnis agar produk unggulan daerah memiliki daya saing yang berkelanjutan.

Salah satu strategi untuk memperkuat keunggulan kompetitif adalah melalui hilirisasi produk. Hilirisasi merupakan proses peningkatan nilai tambah suatu komoditas melalui pengolahan lebih lanjut sebelum dipasarkan kepada konsumen. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada penjualan bahan mentah serta meningkatkan kontribusi ekonomi yang diperoleh masyarakat dan daerah.

Menurut Kaplinsky dan Morris (2001), penciptaan nilai tambah dalam suatu rantai nilai (value chain) terjadi ketika pelaku usaha mampu melakukan transformasi produk, meningkatkan kualitas, memperluas fungsi pemasaran, dan mengembangkan inovasi yang memberikan manfaat ekonomi lebih besar. Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya meningkatkan harga jual produk, tetapi juga memperkuat posisi pelaku usaha lokal dalam rantai pasok nasional maupun global.

Dalam perspektif pembangunan daerah, hilirisasi produk unggulan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Produk lokal yang diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi cenderung memiliki daya saing yang lebih kuat dibandingkan produk primer yang dijual tanpa proses pengolahan. Selain itu, hilirisasi dapat mendorong tumbuhnya industri pendukung, memperluas jaringan pemasaran, serta meningkatkan investasi di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan strategi hilirisasi ke dalam perencanaan pembangunan melalui dukungan kebijakan, penguatan teknologi produksi, akses pembiayaan, dan pengembangan kemitraan usaha sehingga produk unggulan daerah mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Porter, 1990; Kaplinsky & Morris, 2001).

2.3 Digitalisasi sebagai Agenda RPJMD

Transformasi digital menjadi salah satu agenda strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, serta daya saing ekonomi daerah. Digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga mencakup perubahan cara kerja, tata kelola, dan pola interaksi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah, penerapan teknologi digital memungkinkan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, banyak pemerintah daerah menjadikan transformasi digital sebagai salah satu prioritas pembangunan guna mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

**SENTUHAN DIGITAL,
DAMPAK MAKSIMAL
UNTUK EKONOMI LOKAL**

Dari perspektif ekonomi, digitalisasi berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas, efisiensi operasional, dan perluasan akses pasar bagi pelaku usaha. Brynjolfsson dan McAfee (2014) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah cara organisasi dan individu menciptakan nilai ekonomi melalui otomatisasi, pemanfaatan data, kecerdasan buatan, serta konektivitas yang semakin luas. Dalam era ekonomi digital, pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dapat memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan interaksi dengan konsumen, serta mengoptimalkan proses bisnis. Dengan demikian, digitalisasi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing produk unggulan daerah dan memperkuat ekonomi lokal di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, digitalisasi juga memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan integrasi data pembangunan, peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*), serta penguatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, RPJMD perlu mengintegrasikan kebijakan transformasi digital ke dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif, dan pengembangan produk unggulan daerah. Dengan dukungan infrastruktur digital yang memadai, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi dapat menjadi katalisator bagi percepatan pembangunan daerah yang inovatif, inklusif, dan berdaya saing tinggi (Brynjolfsson & McAfee, 2014; Mergel, Edelmann, & Haug, 2019).

2.4. Tantangan Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Pengembangan produk unggulan daerah di Kota Bogor tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan RPJMD.

Meskipun pemerintah daerah telah mendorong penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM, hilirisasi produk, dan transformasi digital, masih terdapat berbagai hambatan yang perlu mendapat perhatian. Tantangan-tantangan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek sumber daya manusia, kelembagaan, dan dinamika pasar yang semakin kompetitif. Salah satu tantangan utama adalah resistensi sebagian pelaku usaha kecil dan menengah terhadap adopsi teknologi digital. Banyak pelaku usaha yang masih mengandalkan metode pemasaran konvensional dan memiliki keterbatasan literasi digital sehingga belum mampu memanfaatkan platform digital secara optimal. Kondisi ini menyebabkan proses transformasi digital berjalan lebih lambat dibandingkan target yang diharapkan. Padahal, digitalisasi merupakan salah satu instrumen penting untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk unggulan daerah (Brynjolfsson & McAfee, 2014).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur pendukung, terutama akses internet dan teknologi informasi yang belum merata pada seluruh wilayah pengembangan ekonomi. Meskipun Kota Bogor relatif memiliki infrastruktur digital yang lebih baik dibandingkan daerah lain, masih terdapat kesenjangan pemanfaatan teknologi di kalangan pelaku usaha mikro dan usaha rumah tangga. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pembiayaan, teknologi pengolahan, dan pendampingan usaha juga menjadi faktor yang menghambat proses hilirisasi produk unggulan.

Di sisi lain, persaingan pasar yang semakin terbuka menuntut produk unggulan daerah untuk memiliki kualitas, inovasi, dan diferensiasi yang lebih baik. Produk lokal tidak hanya bersaing dengan produk dari daerah lain di Indonesia, tetapi juga dengan produk impor yang memiliki skala produksi dan jaringan pemasaran yang lebih kuat. Oleh karena itu, strategi pengembangan produk unggulan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas produk, sertifikasi, penguatan merek (*branding*), dan inovasi berkelanjutan agar mampu mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar regional maupun nasional.

2.5. Kerangka Konseptual Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Reviewer juga tepat ketika meminta adanya kerangka konseptual. Tanpa kerangka tersebut, hubungan antara RPJMD, produk unggulan, hilirisasi, dan digitalisasi masih terlihat terpisah-pisah.



Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan bahwa pengembangan produk unggulan daerah berawal dari potensi lokal yang dimiliki Kota Bogor, meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, UMKM, dan dukungan kebijakan pembangunan daerah. Potensi tersebut kemudian ditransformasikan melalui berbagai proses strategis, seperti hilirisasi produk, inovasi, digitalisasi pemasaran, penguatan rantai nilai, dan pengembangan kemitraan usaha. Proses transformasi tersebut diharapkan menghasilkan peningkatan nilai tambah produk, daya saing ekonomi daerah, dan pertumbuhan usaha lokal yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pencapaian indikator pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis konten (content analysis) terhadap dokumen kebijakan dan data statistik daerah. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara arah kebijakan pembangunan daerah dengan strategi pengembangan produk unggulan di Kota Bogor.

Sumber data penelitian terdiri atas: (1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2025–2029, (2) data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor menurut lapangan usaha periode 2020–2024, dan (3) data perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Bogor pada periode 2020–2024 yang diperoleh dari publikasi resmi pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS). Rentang waktu tersebut dipilih untuk menggambarkan kondisi ekonomi daerah sebelum dan selama periode awal implementasi RPJMD.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, kategorisasi tema kebijakan, dan interpretasi hubungan antara kebijakan RPJMD dengan kondisi ekonomi daerah. Fokus analisis diarahkan pada kebijakan pengembangan produk unggulan, peningkatan daya saing daerah, hilirisasi produk, serta transformasi digital yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan RPJMD mendukung pengembangan produk unggulan dan memberikan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kota Bogor.

Ilustrasi penelitian. (Sumber: canva.com)



4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Transformasi Produk Unggulan sebagai Implementasi RPJMD

Pengembangan produk talas menjadi berbagai produk olahan merupakan bentuk implementasi strategi hilirisasi ekonomi yang selaras dengan misi RPJMD dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah (Kaplinsky & Morris, 2001).

4.2 UMKM dan Indikator Kinerja RPJMD

RPJMD Kota Bogor menetapkan indikator kinerja utama yang berkaitan dengan ekonomi, seperti:

- pertumbuhan ekonomi daerah
- penurunan tingkat pengangguran
- peningkatan jumlah UMKM

Dalam hal ini, UMKM berperan sebagai penggerak utama pencapaian indikator tersebut (BPS Kota Bogor, 2025; Tambunan, 2019).

4.3 PKL dalam Perspektif Pembangunan Inklusif

RPJMD juga menekankan pembangunan inklusif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. PKL sebagai bagian dari ekonomi informal memiliki kontribusi penting dalam:

- menciptakan lapangan kerja
- meningkatkan akses ekonomi masyarakat
- mendukung distribusi produk lokal

Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi inklusif (Chen, 2012).

4.4 Digitalisasi UMKM dan Target RPJMD

Digitalisasi UMKM menjadi bagian dari indikator transformasi ekonomi daerah, antara lain:

- peningkatan jumlah UMKM digital
- peningkatan akses pasar
- peningkatan produktivitas

Pemanfaatan teknologi digital oleh UMKM Kota Bogor menunjukkan keselarasan dengan agenda RPJMD (Brynjolfsson & McAfee, 2014; UNCTAD, 2021).

4.5 Keterkaitan dengan PDRB dan Target Pembangunan

Struktur PDRB Kota Bogor menunjukkan dominasi sektor perdagangan, industri pengolahan, dan jasa, yang menjadi fokus pengembangan dalam RPJMD. Kontribusi sektor perdagangan sekitar 19% mencerminkan pentingnya distribusi produk unggulan dalam ekonomi daerah (BPS Kota Bogor, 2025). Untuk memperkuat keterkaitan antara hasil analisis dengan arah kebijakan pembangunan daerah, berikut disajikan pemetaan antara temuan penelitian dengan indikator kinerja RPJMD Kota Bogor.

No	Isu Strategis RPJMD	Indikator Kinerja RPJMD	Kondisi Empiris (Artikel)	Kontribusi Produk Unggulan	Rekomendasi Kebijakan
1	Peningkatan daya saing ekonomi daerah	Pertumbuhan ekonomi (%)	Ekonomi didominasi sektor perdagangan sebesar $\pm 19,2\%$ pada tahun 2024 (BPS Kota Bogor, 2025)	Produk unggulan meningkatkan aktivitas perdagangan dan nilai tambah	Penguatan hilirisasi produk lokal berbasis UMKM
2	Penguatan UMKM	Jumlah UMKM aktif & produktif	UMKM berkembang di sektor kuliner, kreatif, oleh-oleh	Produk talas, asinan, dan inovasi lokal memperluas pasar UMKM	Digitalisasi UMKM dan akses pembiayaan
3	Penurunan pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	PKL dan UMKM menyerap tenaga kerja informal	PKL sebagai inkubator usaha dan penyedia lapangan kerja	Formalisasi bertahap dan pembinaan PKL
4	Pembangunan ekonomi inklusif	Indeks Gini / pemerataan pendapatan	Sektor informal berperan besar dalam ekonomi lokal	Produk unggulan berbasis komunitas meningkatkan distribusi pendapatan	Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis komunitas
5	Transformasi digital daerah	Jumlah UMKM go digital	UMKM mulai memanfaatkan marketplace & media sosial	Produk lokal menjangkau pasar nasional melalui digitalisasi	Pelatihan digital dan integrasi platform e-commerce
6	Pengembangan pariwisata daerah	Jumlah kunjungan wisatawan	Wisata kuliner dan oleh-oleh menjadi daya tarik	Produk unggulan (talas, asinan) mendukung ekonomi wisata	Integrasi produk unggulan dengan paket wisata
7	Peningkatan nilai tambah ekonomi	PDRB sektor industri pengolahan	Hilirisasi produk pertanian menjadi produk olahan	Talas diolah menjadi produk bernilai tinggi	Pengembangan klaster industri pengolahan lokal

Tabel tersebut menunjukkan bahwa transformasi produk unggulan memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian indikator RPJMD, khususnya dalam aspek daya saing ekonomi, inklusivitas, dan digitalisasi. Tabel keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan produk unggulan daerah tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi lokal, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja RPJMD. Dengan demikian, kebijakan penguatan produk unggulan perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

4.6. Keterkaitan dengan RPJMD

Untuk memastikan bahwa pengembangan produk unggulan daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan, diperlukan pemetaan yang jelas antara hasil analisis dan indikator kinerja RPJMD. Tabel berikut menunjukkan keterkaitan antara transformasi produk unggulan Kota Bogor dengan isu strategis, indikator kinerja, serta rekomendasi kebijakan yang relevan.

No	Aspek Transformasi Produk Unggulan	Isu Strategis RPJMD	Indikator Kinerja RPJMD	Rekomendasi Kebijakan
1	Penguatan produk unggulan berbasis UMKM	Rendahnya daya saing produk lokal	Pertumbuhan UMKM dan kontribusi ekonomi lokal	Pelatihan kewirausahaan, peningkatan kualitas produk, dan fasilitasi sertifikasi
2	Hilirisasi produk unggulan	Rendahnya nilai tambah produk lokal	Peningkatan nilai tambah sektor unggulan	Pengembangan industri pengolahan, kemitraan usaha, dan penguatan rantai nilai (value chain)
3	Digitalisasi pemasaran produk	Terbatasnya akses pasar	Persentase UMKM yang memanfaatkan platform digital	Pengembangan marketplace, pelatihan pemasaran digital, dan literasi teknologi
4	Inovasi produk berbasis potensi lokal	Kurangnya diferensiasi produk	Jumlah produk unggulan inovatif	Dukungan riset dan pengembangan, inkubasi bisnis, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi
5	Penguatan jejaring pemasaran	Keterbatasan akses pasar regional dan nasional	Peningkatan volume penjualan produk unggulan	Promosi terpadu, partisipasi dalam pameran, dan pengembangan kemitraan bisnis

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengembangan produk unggulan daerah memiliki keterkaitan langsung dengan berbagai isu strategis yang tercantum dalam RPJMD Kota Bogor. Upaya penguatan UMKM, hilirisasi produk, dan digitalisasi pemasaran merupakan strategi yang dapat mendukung peningkatan daya saing ekonomi daerah. Selain itu, inovasi produk dan perluasan akses pasar juga berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, transformasi produk unggulan perlu diintegrasikan secara sistematis ke dalam program dan kegiatan pembangunan daerah agar memberikan dampak yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

5. Implikasi Kebijakan Berbasis RPJMD

Berdasarkan analisis, strategi kebijakan yang relevan dengan RPJMD meliputi:

- Penguatan hilirisasi produk unggulan daerah
- Digitalisasi UMKM berbasis inklusivitas
- Pengembangan klaster ekonomi lokal
- Pemberdayaan PKL sebagai bagian ekonomi formal
- Integrasi produk unggulan dengan sektor pariwisata

Strategi ini mendukung pencapaian visi RPJMD dalam menciptakan kota yang berdaya saing dan berkelanjutan.

6. Kesimpulan

Transformasi produk unggulan Kota Bogor dari talas hingga digital menunjukkan keselarasan yang kuat dengan visi, misi, dan indikator kinerja RPJMD. UMKM dan PKL menjadi aktor utama dalam mendorong ekonomi inklusif, sementara digitalisasi menjadi akselerator utama dalam meningkatkan daya saing. Dengan kebijakan yang tepat dan berbasis data, produk unggulan daerah dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi Kota Bogor yang berkelanjutan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa transformasi produk unggulan—dari komoditas tradisional seperti talas menjadi produk olahan bernilai tambah hingga pemasaran berbasis digital—merupakan proses strategis yang didukung oleh struktur ekonomi daerah yang didominasi sektor perdagangan, industri pengolahan, dan jasa.

Penelitian ini menegaskan bahwa UMKM dan pedagang kaki lima (PKL) memiliki peran sentral sebagai aktor ekonomi lokal yang tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terhadap pencapaian indikator kinerja RPJMD, seperti peningkatan daya saing daerah, penyerapan tenaga kerja, dan penguatan ekonomi inklusif. Digitalisasi terbukti menjadi akselerator utama dalam memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi, sehingga memperkuat posisi produk unggulan daerah dalam ekosistem ekonomi modern (Brynjolfsson & McAfee, 2014; UNCTAD, 2021).

Selain itu, keterkaitan antara struktur PDRB dan pengembangan produk unggulan menunjukkan bahwa strategi hilirisasi ekonomi lokal memiliki relevansi tinggi dalam kebijakan pembangunan daerah (Kaplinsky & Morris, 2001; Porter, 1990). Dengan demikian, penguatan produk unggulan daerah tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan dalam mencapai target RPJMD secara terukur dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan perspektif akademik dan kebijakan dalam analisis produk unggulan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi lokal di Kota Bogor sangat bergantung pada sinergi antara inovasi produk, digitalisasi UMKM, pemberdayaan sektor informal, serta dukungan kebijakan yang berbasis data dan terarah.

Pengesahan RPJMD Kota Bogor 2025–2029. (Sumber: bogor24update.id)



Rekomendasi Strategis

Sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian, terdapat tiga rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan dalam kerangka kebijakan pembangunan daerah di Kota Bogor. Pertama, penguatan hilirisasi produk unggulan berbasis UMKM melalui pengembangan klaster industri lokal, peningkatan kualitas produk, dan dukungan sertifikasi guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Kedua, percepatan digitalisasi UMKM secara inklusif, termasuk pelatihan literasi digital, integrasi dengan platform e-commerce, serta penguatan infrastruktur digital untuk memperluas akses pasar. Ketiga, pemberdayaan sektor informal (PKL) secara terstruktur dan berkelanjutan, melalui penataan kawasan, fasilitasi legalitas usaha, serta integrasi ke dalam ekosistem ekonomi formal guna mendukung pencapaian indikator RPJMD terkait inklusivitas dan pemerataan ekonomi.

Festival UMKM Kota Bogor. (Sumber: kotabogor.go.id)



Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kota Bogor. (2025). *Kota Bogor Dalam Angka 2025*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. (2021). *RPJMD Kota Bogor*.
- Blakely, E. J., & Leigh, N. G. (2013). *Planning local economic development: Theory and practice*. Sage Publications.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age*. W.W. Norton & Company.
- Chen, M. A. (2012). The informal economy: Definitions, theories and policies. *WIEGO Working Paper*.
- Kaplinsky, R., & Morris, M. (2001). *A handbook for value chain research*. Institute of Development Studies, University of Sussex.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*. Bappenas.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2022). *Pengembangan ekonomi lokal dan UMKM di Indonesia*.
- Porter, M. E. (1990). *The competitive advantage of nations*. Free Press.
- Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Tambunan, T. (2019). *UMKM di Indonesia: Perkembangan dan tantangan*. Ghalia Indonesia.
- UNCTAD. (2021). *Digital economy report*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson Education.

Analisis Dinamika Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap PDRB Sektor Industri Kota Bogor Tahun 2016–2025

Penulis : Julindi Diva Yanus - Universitas Negeri Semarang



Ilustrasi pendapatan. (Sumber: canva.com)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sektor industri pengolahan di Kota Bogor. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode time series pada periode 2016–2025. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi Ordinary Least Squares (OLS) dengan tahapan

pengujian stasioneritas menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF), transformasi data melalui second differencing, serta uji diagnostik untuk memastikan kelayakan model. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dinamika hubungan antara PAD, TKD, dan kinerja sektor industri pengolahan, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan fiskal yang lebih efektif untuk mendukung penguatan sektor industri dan peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Kata Kunci: PAD, TKD, PDRB ADHB Industri, Kota Bogor

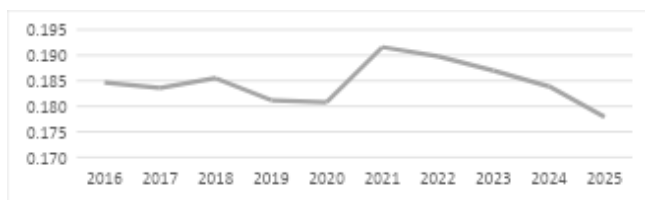
PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Kota Bogor merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki posisi strategis sebagai bagian dari wilayah metropolitan Jabodetabek. Dikenal sebagai “Kota Hujan”, kota ini tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan pariwisata, tetapi juga berkembang sebagai kawasan industri dan perdagangan yang mendukung perekonomian nasional. Kota Bogor menjadi kawasan penyangga mobilitas tenaga kerja Jakarta, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang dinamis dari tahun ke tahun.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menjadi indikator utama yang menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Sektor industri pengolahan merupakan salah satu penyumbang terbesar PDRB Kota Bogor karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan dan memicu *multiplier effect* terhadap sektor-sektor pendukung lainnya.

Namun, peran sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB kota mengalami tren menurun yaitu dari 19,6% (2021) menjadi 18,53% (2023), sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2025-2029. Penurunan kontribusi ini menjadi masalah struktural yang perlu mendapat perhatian serius, karena dapat menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja di masa mendatang.

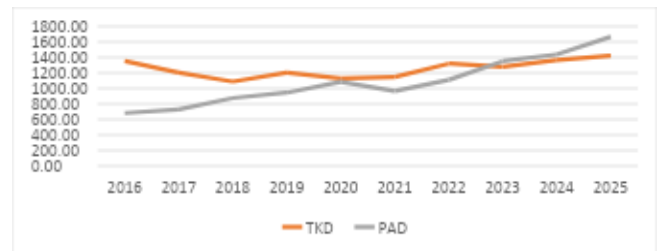


Gambar 1. Grafik PDRB Sektor Industri Tahun 2016-2025

Sumber; BPS Kota Bogor

Dalam konteks pembiayaan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Keduanya menjadi pilar utama pembiayaan pembangunan daerah, termasuk pengembangan sektor industri.



Gambar 2. Perbandingan TKD dan PAD Tahun 2016-2025.

Sumber; DJPK KEMENKEU

Kebijakan pemangkasan TKD secara nasional oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari penyesuaian fiskal telah menimbulkan kekhawatiran bagi banyak daerah, termasuk Kota Bogor. Pemangkasan ini berpotensi mengurangi ruang fiskal daerah dalam mendanai program prioritas, khususnya penguatan sektor industri. Pada grafik di atas, tren TKD dan PAD di Kota Bogor periode 2016–2025 menunjukkan dinamika yang berbeda. TKD cenderung fluktuatif dengan penurunan pada periode awal dan stabilisasi di tahun-tahun berikutnya, sedangkan PAD menunjukkan peningkatan yang konsisten dan bahkan melampaui TKD mulai tahun 2022 hingga 2025. Pola ini mengindikasikan bahwa PAD semakin menjadi andalan pembiayaan daerah, meskipun TKD tetap berperan penting sebagai sumber dana eksternal.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai pengaruh TKD dan PAD terhadap PDRB ADHB sektor industri pengolahan di Kota Bogor menjadi sangat penting. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika kedua variabel tersebut serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat guna mengoptimalkan pembiayaan daerah, memperkuat sektor industri pengolahan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Bogor yang inklusif dan berkelanjutan.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB ADHB sektor industri pengolahan di Kota Bogor?
2. Bagaimana pengaruh Transfer ke Daerah (TKD) terhadap PDRB ADHB sektor industri pengolahan di Kota Bogor?
3. Apakah PAD dan TKD secara simultan berpengaruh terhadap PDRB ADHB sektor industri pengolahan di Kota Bogor?

LANDASAN TEORI

Teori Desentralisasi Fiskal (*Fiscal Federalism*) menjadi landasan utama dalam menganalisis hubungan antara sumber pembiayaan daerah (PAD dan TKD) dengan kinerja sektor ekonomi seperti industri pengolahan. Teori ini, yang dikembangkan oleh Oates (1999), menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah lebih responsif dan efisien dalam mengalokasikan sumber daya karena lebih memahami kebutuhan lokal dibandingkan pemerintah pusat. Dalam konteks Indonesia, PAD sebagai pendapatan endogen diharapkan memberikan fleksibilitas lebih besar untuk mendanai belanja produktif, sedangkan TKD berfungsi sebagai instrumen perimbangan fiskal untuk mengurangi kesenjangan antardaerah. Jika alokasi dana tersebut diarahkan ke sektor basis seperti industri, maka seharusnya terjadi *multiplier effect* yang positif terhadap PDRB.

Teori *Flypaper Effect* melengkapi pemahaman tentang perilaku pemerintah daerah dalam menggunakan dana transfer. Teori ini menyatakan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat (TKD) cenderung “nempel” pada belanja daerah dan mendorong peningkatan pengeluaran lebih besar dibandingkan peningkatan PAD yang setara, karena dana transfer sering dianggap sebagai “uang gratis” (Inman, 2008).

Teori *Crowding-Out Effect* juga relevan untuk menjelaskan kemungkinan dampak negatif dari peningkatan dana daerah. Menurut teori ini, peningkatan belanja pemerintah yang tidak tepat sasaran dapat mengurangi ruang fiskal swasta atau menggeser alokasi sumber daya dari sektor produktif ke belanja non-produktif, sehingga menghambat pertumbuhan sektor industri (Carrasco, 1998).



Industri pengolahan makanan. (Sumber: canva.com)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan *time series*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder periode 2016-2025. Seluruh data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengunduh data tahunan secara langsung dari portal resmi, kemudian dilakukan pembersihan dan penyesuaian agar tidak terdapat *missing value* pada periode yang diteliti. Adapun 3 variabel yang digunakan, yaitu:

Variabel	Keterangan	Sumber
PDRB Sektor Industri	Nilai tambah bruto sektor industri pengolahan atas dasar harga berlaku (ADHB) yang menjadi indikator utama kinerja sektor industri di Kota Bogor.	BPS Kota Bogor
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan daerah yang bersumber dari dalam wilayah Kota Bogor sendiri, meliputi pajak dan retribusi daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah.	DJPK KEMENKEU
Transfer Ke Daerah (TKD)	Dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kota Bogor yang mencakup DAU, DAK, DBH, dan bentuk transfer lainnya.	DJPK KEMENKEU

Teknik analisis data yang digunakan adalah model *Ordinary Least Squares* (OLS). Analisis dilakukan dengan software Stata 17 dengan tahapan sebagai berikut: (1) uji stasioneritas (Augmented Dickey-Fuller), (2) *first differencing*, (3) *second differencing*, (4) estimasi model OLS, dan (5) uji diagnostik (autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas residual).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi model regresi Ordinary Least Squares (OLS) setelah seluruh variabel mengalami *second differencing* (I(2)) menunjukkan bahwa perubahan kedua (*second difference*) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer Ke Daerah (TKD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perubahan kedua PDRB sektor industri Kota Bogor. Hal ini dibuktikan melalui uji simultan (F-test) dengan nilai Prob > F sebesar 0,0412 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Nilai koefisien determinasi (R-squared) sebesar 0,7209 menunjukkan bahwa sekitar 72,09% variasi perubahan kedua PDRB sektor industri dapat dijelaskan oleh perubahan kedua PAD dan TKD, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model seperti investasi swasta, tenaga kerja, kondisi ekonomi makro dan lainnya.

Sebelum melakukan estimasi, seluruh variabel telah melalui pengujian stasioneritas untuk menghindari regresi lancung (*spurious regression*). Nilai p-value hasil uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) disajikan pada tabel berikut:

Variabel	First Differencing I(1)	Second Differencing I(2)
PDRB Sektor Industri	0,183	0,0248
PAD	0,0386	0,0006
TKD	0,0226	0,0002

Tabel 1. Hasil Uji Stasioner (ADF)

Secara parsial, variabel PAD memiliki koefisien negatif sebesar $-0,0000348$ dengan p -value $0,021$. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan perubahan kedua PAD cenderung diikuti oleh penurunan perubahan kedua PDRB sektor industri. Sementara itu, variabel TKD juga memiliki koefisien negatif sebesar $-0,000026$ dengan p -value $0,066$, yang berarti tidak signifikan pada tingkat 5%. Dengan demikian, baik PAD maupun TKD menunjukkan hubungan negatif terhadap dinamika pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam jangka pendek.

Secara teoritis, hasil negatif ini tidak sepenuhnya sejalan dengan Teori Desentralisasi Fiskal (Oates, 1972) yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah seharusnya memperkuat kemampuan daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal.

Namun, temuan ini lebih konsisten dengan Teori *Flypaper Effect* (Hines & Thaler, 1995), di mana dana transfer cenderung mendorong peningkatan belanja pemerintah daerah tetapi tidak selalu menghasilkan output produktif yang signifikan.

Selain itu, hasil ini juga dapat dikaitkan dengan *Crowding-Out Effect* (Barro, 1990), yaitu kondisi ketika belanja pemerintah yang kurang tepat sasaran berpotensi menghambat efektivitas investasi sektor produktif.

Hubungan negatif statistik ini juga kuat mengindikasikan adanya *omitted variable bias*, di mana model belum mengontrol variabel riil eksternal yang paling dominan mempengaruhi output manufaktur, yaitu Investasi dan Tenaga Kerja (beserta UMK).

Sebagai sektor yang padat modal (*capital intensive*), output PDRB industri sangat bergantung pada masuknya investasi swasta untuk pembaruan mesin dan ekspansi pabrik. Di sisi lain, Kota Bogor menghadapi tren kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) yang agresif setiap tahunnya.

Bagi industri pengolahan, upah merupakan komponen biaya produksi terbesar.

Kenaikan UMK yang tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja akan langsung menggerus margin keuntungan.

Pengabaian kedua faktor fundamental ini dalam model regresi menyebabkan efek distorsi, sehingga peningkatan fiskal daerah (PAD dan TKD) terlihat berjalan berlawanan arah dengan pertumbuhan sektor industri yang sedang tertekan oleh tingginya biaya modal dan upah di lapangan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Solim (2017) yang menyatakan bahwa PAD maupun dana transfer tidak selalu berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor tertentu apabila alokasi belanja tidak diarahkan pada sektor produktif.

Oleh karena itu, hubungan negatif dalam penelitian ini dapat mengindikasikan adanya mismatch kebijakan fiskal, yaitu peningkatan penerimaan daerah belum diikuti dengan peningkatan belanja produktif yang mendukung sektor industri pengolahan.

Hal ini juga sejalan dengan Notonegoro & Rustam (2021) yang menekankan bahwa dampak PAD terhadap pertumbuhan ekonomi akan terbatas apabila tidak disertai reformasi pengeluaran daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Bogor disarankan untuk memperkuat prioritas belanja produktif melalui peningkatan porsi belanja modal dari PAD dan TKD, terutama untuk pembangunan infrastruktur pendukung industri seperti akses transportasi, energi, serta fasilitas kawasan industri.

Selain itu, pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal berupa keringanan pajak dan retribusi bagi pelaku usaha industri, serta melakukan optimalisasi pendapatan daerah yang berkaitan langsung dengan aktivitas industri.

Dengan demikian, peningkatan PAD dan TKD tidak hanya bersifat nominal, tetapi juga mampu memberikan dampak riil terhadap pertumbuhan sektor industri dan kemandirian fiskal daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi Ordinary Least Squares (OLS) dengan data *time series* Kota Bogor periode 2016–2025, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer Ke Daerah (TKD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perubahan PDRB ADHB sektor industri pengolahan di Kota Bogor. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Prob > F sebesar 0,0412 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05.

Secara parsial, hasil estimasi menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan PDRB sektor industri, dengan p-value sebesar 0,021. Sementara itu, TKD juga memiliki pengaruh negatif terhadap PDRB sektor industri.

Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan fiskal daerah belum secara otomatis mendorong percepatan pertumbuhan sektor industri pengolahan. Hubungan negatif ini disebabkan oleh adanya mismatch struktural, di mana proporsi penggunaan anggaran daerah masih condong pada pembiayaan belanja rutin dan aparatur daerah (seperti belanja pegawai dan operasional) ketimbang belanja fungsi ekonomi.

Kantor pemerintahan Kota Bogor.



Selain itu, model ini juga belum mengontrol faktor riil eksternal seperti fluktuasi investasi swasta dan tingginya beban Upah Minimum Kota (UMK) yang langsung menekan margin laba industri manufaktur di lapangan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bogor disarankan untuk meningkatkan proporsi belanja modal produktif yang diarahkan pada penguatan sektor industri. Secara spesifik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) harus mendukung melalui percepatan pembangunan dan perbaikan akses jalan logistik menuju kawasan industri guna memangkas biaya transportasi. Selanjutnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu menyusun skema insentif fiskal seperti keringanan pajak daerah atau kemudahan perizinan guna merangsang masuknya investasi baru. Terakhir, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) disarankan untuk mengoptimalkan pelatihan vokasi berbasis kemitraan dengan sektor swasta agar produktivitas tenaga kerja lokal meningkat sebanding dengan laju kenaikan UMK. Melalui koordinasi lintas sektor ini, peningkatan PAD dan TKD tidak hanya bersifat nominal, tetapi juga mampu memberikan dampak riil terhadap pertumbuhan sektor industri dan kemandirian fiskal daerah.

REFERENSI

- Bogor, Kota. (2025). *RPJMD Kota bogor 2025-2029*. (21).
- Carrasco, Marie. (1998). *Crowding Out and Government Spending Crowding Out and Government Spending*. 2(1).
- Inman, Robert P. (2008). *THE FLYPAPER EFFECT*.
- Notonegoro, Komaidi, & Rustam, Rinaldi. (2021). *The Effect of Local Own-Source Revenue and Capital Expenditure on Economic Growth: An Empirical Evidence from Aceh Province , Indonesia*. 4887–4895.
- Oates, Wallace E. (1999). *An Essay on Fiscal Federalism*. XXXVII(September), 1120–1149.
- Solim, Rahmat. (2017). *ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ALOKASI DANA TRANSFER TERHADAP PERTUMBUHAN PDRB DI ERA DESENTRALISASI FISKAL TAHUN 2011-2015 (STUDI KASUS 38 KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR)*. 2015.



MAKANAN KHAS KOTA BOGOR

Bolu Talas | Roti Unyil |
Soto Mie | Asinan | Kue
Ali | Doclang | Talas

Membangun Kota Halal Berbasis Sains:

Peluang Inovasi dan Keunggulan Bogor di Era Ekonomi Global

■ Penulis : Abdul Salam, S.E., S.Pd., M.Si. - Kecamatan Bogor Utara



Logo Halal. (Sumber: canva.com)

Konsep Kota Halal tidak hanya berkaitan dengan aspek religius, tetapi juga mencerminkan integrasi antara standar kesehatan, keamanan produk, keberlanjutan lingkungan, serta inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks global, ekonomi halal telah berkembang menjadi salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia.

Artikel ini membahas peluang pengembangan Kota Halal di Bogor sebagai pusat inovasi

berbasis sains dan teknologi dengan merujuk pada regulasi nasional serta potensi lokal yang dimiliki. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis dengan mengkaji kebijakan, literatur ilmiah, serta kondisi empiris. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Bogor memiliki peluang besar untuk menjadi model Kota Halal berbasis sains melalui penguatan riset, kolaborasi lintas sektor, dan optimalisasi potensi daerah.

Kata kunci: Kota Halal, Bogor, inovasi, ekonomi halal, sains dan teknologi

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi halal global menunjukkan tren yang semakin meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy Report (DinarStandard, 2023), pengeluaran konsumen Muslim dunia pada sektor makanan halal, keuangan syariah, fesyen muslim, farmasi, kosmetik, media, dan pariwisata terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi halal telah berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi global yang memiliki potensi besar dan daya saing tinggi.

Meskipun memiliki potensi pasar yang besar, kontribusi Indonesia dalam rantai nilai industri halal global masih belum optimal dibandingkan dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi rendahnya tingkat sertifikasi halal pada pelaku usaha, keterbatasan riset dan inovasi, serta belum terintegrasinya pengembangan industri halal antar sektor. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk menyusun berbagai regulasi dan kebijakan yang bertujuan memperkuat tata kelola ekosistem halal, meningkatkan kepastian hukum, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi halal nasional.

"Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk mendukung ekosistem halal, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal...". Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi untuk mendukung ekosistem halal, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Regulasi ini menjadi landasan penting dalam menjamin kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mendorong daya saing produk nasional di pasar global.

Namun demikian, pengembangan ekosistem halal tidak cukup hanya melalui regulasi. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu melalui pembangunan kawasan atau kota yang mengintegrasikan prinsip halal dalam berbagai aspek kehidupan.

Konsep Kota Halal menjadi salah satu solusi strategis dalam mewujudkan hal tersebut, dengan menggabungkan nilai religius, standar ilmiah, dan inovasi teknologi.

KOTA HALAL SEBAGAI EKOSISTEM ILMIAH

Kota Halal merupakan konsep pengembangan wilayah yang mengintegrasikan prinsip halal dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Konsep ini tidak hanya berfokus pada penyediaan produk bersertifikat halal, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung gaya hidup halal secara menyeluruh.

Dalam perspektif ilmiah, konsep Kota Halal mencakup beberapa komponen utama yang saling terintegrasi dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial berbasis prinsip halal. Menurut Islamic Development Bank dan laporan State of the Global Islamic Economy Report (DinarStandard, 2023), pengembangan ekosistem halal tidak hanya berfokus pada produk, tetapi juga mencakup tata kelola, inovasi, keberlanjutan, dan layanan pendukung lainnya.

Komponen 1

Pertama, standarisasi produk halal berbasis sains. Proses jaminan halal memerlukan pengujian laboratorium, sistem sertifikasi yang kredibel, serta pemanfaatan teknologi untuk menjamin kehalalan dan keamanan produk. Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal merupakan instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen terhadap produk yang beredar di masyarakat.

Komponen 2

Kedua, inovasi dalam bidang teknologi pangan dan farmasi halal. Penelitian dan pengembangan menjadi faktor penting dalam menciptakan produk halal yang berkualitas, aman, dan mampu bersaing di pasar global. Menurut Halal Science, inovasi teknologi berperan dalam pengembangan bahan baku, proses produksi, hingga metode verifikasi halal yang lebih akurat dan efisien (Rahman et al., 2021).

Komponen 3

Ketiga, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Konsep halal tidak hanya berkaitan dengan aspek konsumsi, tetapi juga mencakup prinsip keberlanjutan (sustainability). Beekun dan Badawi (2005) menjelaskan bahwa prinsip Islam mendorong pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab serta menjaga keseimbangan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan.

Komponen 4

Keempat, pengembangan pariwisata halal berbasis budaya lokal. Pariwisata halal tidak hanya menyediakan fasilitas ibadah dan makanan halal, tetapi juga menghadirkan pengalaman wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Islam tanpa menghilangkan karakteristik budaya daerah. Menurut Global Muslim Travel Index, ketersediaan layanan halal menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan daya tarik destinasi wisata bagi wisatawan Muslim global.

POTENSI BOGOR DALAM PENGEMBANGAN KOTA HALAL

Bogor memiliki berbagai keunggulan yang menjadikannya sebagai kandidat kuat dalam pengembangan Kota Halal berbasis sains. Salah satu keunggulan utama adalah keberadaan berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset, seperti Institut Pertanian Bogor (IPB), yang memiliki kapasitas dalam menghasilkan inovasi, melakukan penelitian, serta menyediakan sumber daya manusia yang kompeten.

Kebun Raya Bogor. (Sumber: skycitytrans.com)



Keberadaan institusi tersebut dapat menjadi fondasi dalam pengembangan laboratorium halal, riset bahan baku halal, serta inovasi teknologi yang mendukung proses sertifikasi dan pengawasan produk halal. Oleh karena itu, strategi pengembangan Kota Halal di Bogor perlu diarahkan pada penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha melalui model triple helix untuk mempercepat inovasi dan hilirisasi hasil penelitian.

Selain itu, sektor UMKM di Bogor memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi halal, khususnya pada sektor makanan dan minuman. Namun, sebagian UMKM masih menghadapi kendala dalam aspek sertifikasi halal, digitalisasi usaha, dan akses pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, strategi yang dapat dilakukan adalah memperluas program pendampingan sertifikasi halal, meningkatkan pelatihan manajemen usaha berbasis digital, serta membangun pusat inkubasi bisnis halal yang terintegrasi dengan perguruan tinggi dan lembaga pendamping UMKM.

Potensi lain yang dimiliki Bogor adalah sektor pariwisata. Keberadaan kawasan wisata alam, wisata edukasi, dan wisata budaya memberikan peluang untuk mengembangkan konsep pariwisata halal yang terintegrasi. Potensi ini dapat dioptimalkan melalui penyediaan fasilitas ramah Muslim, pengembangan destinasi wisata berbasis budaya lokal, serta penguatan promosi wisata halal berbasis teknologi digital. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan jumlah wisatawan sekaligus memperkuat citra Bogor sebagai destinasi halal yang kompetitif.

Di samping itu, kedekatan Bogor dengan Jakarta memberikan keuntungan dalam akses pasar, investasi, dan distribusi produk halal. Posisi strategis ini memungkinkan Bogor menjadi pusat produksi sekaligus distribusi produk halal untuk wilayah Jabodetabek. Oleh karena itu, pengembangan kawasan industri halal dan pusat logistik halal menjadi strategi yang relevan untuk meningkatkan daya saing ekonomi halal daerah.

TANTANGAN PENGEMBANGAN

Rendahnya Literasi Halal

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan Kota Halal di Bogor adalah masih rendahnya literasi halal di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Banyak pelaku UMKM yang masih memandang sertifikasi halal hanya sebagai persyaratan administratif, bukan sebagai instrumen peningkatan kualitas dan daya saing produk. Kondisi ini menyebabkan rendahnya minat pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya penerapan standar halal dalam seluruh rantai produksi. Apabila kondisi ini tidak diatasi, maka upaya pengembangan ekosistem halal akan berjalan lambat karena partisipasi pelaku usaha sebagai aktor utama ekonomi halal masih terbatas.

Akses Sertifikasi Halal

Tantangan berikutnya adalah akses terhadap sertifikasi halal yang masih menjadi kendala bagi sebagian pelaku UMKM. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai program fasilitasi sertifikasi halal, masih terdapat pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi, penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta keterbatasan sumber daya manusia yang memahami proses sertifikasi. Selain itu, bagi sebagian UMKM, proses pendampingan dan penyesuaian standar produksi memerlukan biaya dan waktu tambahan yang tidak sedikit. Akibatnya, jumlah produk bersertifikat halal belum sebanding dengan potensi UMKM yang dimiliki Kota Bogor.

Kurangnya Integrasi Antar Sektor

Tantangan lainnya adalah belum optimalnya integrasi antar sektor dalam pengembangan Kota Halal. Konsep Kota Halal pada dasarnya membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga sertifikasi, pelaku usaha, komunitas masyarakat, dan sektor pariwisata. Namun dalam praktiknya, program yang dijalankan sering kali masih bersifat sektoral dan belum terhubung dalam satu kerangka pengembangan yang terintegrasi.



Produk makanan halal. (Sumber: canva.com)

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih program, inefisiensi penggunaan sumber daya, dan rendahnya efektivitas implementasi kebijakan.

Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah belum optimalnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam pengembangan industri halal daerah. Meskipun Bogor memiliki berbagai institusi pendidikan dan penelitian yang unggul, hasil riset yang dihasilkan belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan industri dan UMKM. Akibatnya, inovasi yang dihasilkan belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan daya saing produk halal maupun percepatan sertifikasi halal berbasis teknologi.

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Kota Halal di Bogor memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang mampu meningkatkan literasi halal, memperluas akses sertifikasi, memperkuat integrasi antar sektor, serta mengoptimalkan pemanfaatan sains dan teknologi sebagai pendorong utama pengembangan ekosistem halal daerah.

STRATEGI PENGEMBANGAN

Strategi Pengembangan Kota Halal Berbasis Sains dan Teknologi di Bogor

Pengembangan Kota Halal di Bogor perlu dilakukan melalui pendekatan yang memanfaatkan keunggulan lokal yang dimiliki daerah. Salah satu potensi utama Bogor adalah keberadaan berbagai perguruan tinggi dan pusat riset yang memiliki kapasitas dalam bidang pangan, pertanian, farmasi, dan teknologi. Oleh karena itu, strategi utama yang dapat dilakukan adalah membangun ekosistem inovasi halal berbasis kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan dunia usaha. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui pengembangan pusat riset halal (Halal Research Center) yang berfungsi sebagai pusat penelitian, pengujian, sertifikasi, dan pengembangan produk halal berbasis sains.

Strategi Berbasis Pusat Riset

Keberadaan institusi pendidikan dan penelitian di Bogor dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan inovasi produk halal, teknologi deteksi bahan non-halal, sistem ketertelusuran (traceability) produk halal, serta pengembangan bahan baku halal yang memiliki daya saing global. Strategi ini tidak hanya memperkuat aspek sertifikasi, tetapi juga menjadikan Bogor sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi halal di Indonesia.

Strategi Penguatan UMKM Halal

Potensi besar UMKM di Kota Bogor perlu diarahkan menjadi fondasi ekonomi halal daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat membentuk program inkubasi bisnis halal yang melibatkan perguruan tinggi, lembaga sertifikasi halal, dan sektor industri. Program ini dapat memberikan pendampingan sertifikasi halal, pelatihan digitalisasi usaha, pengembangan kemasan produk, hingga akses pemasaran berbasis teknologi digital. Dengan strategi tersebut, UMKM tidak hanya memperoleh sertifikasi halal, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar.

Strategi Pariwisata Halal

Di sektor pariwisata, pengembangan Kota Halal dapat dilakukan melalui integrasi antara wisata alam, wisata edukasi, dan wisata halal. Bogor memiliki berbagai destinasi yang dapat dikembangkan sebagai kawasan wisata ramah Muslim dengan penyediaan fasilitas ibadah, restoran bersertifikat halal, informasi wisata halal berbasis digital, serta promosi wisata yang mengangkat identitas budaya lokal. Strategi ini berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun internasional sekaligus memperkuat citra Bogor sebagai destinasi wisata halal.

Strategi Digitalisasi dan Smart Halal City

Pemanfaatan teknologi informasi juga perlu menjadi bagian utama dalam pengembangan Kota Halal Bogor. Pemerintah daerah dapat mengembangkan platform digital terpadu yang memuat layanan sertifikasi halal, database UMKM halal, peta destinasi wisata halal, informasi produk halal lokal, serta sistem monitoring dan evaluasi program. Konsep ini sejalan dengan pengembangan Smart Halal City yang mengintegrasikan prinsip halal dengan transformasi digital.

Strategi Triple Helix

Untuk memastikan keberlanjutan program, diperlukan model kolaborasi triple helix yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor industri. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, perguruan tinggi sebagai pusat riset dan inovasi, sedangkan dunia usaha menjadi pelaksana sekaligus pengguna hasil inovasi. Melalui sinergi tersebut, potensi yang dimiliki Bogor dapat dioptimalkan menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan Kota Halal berbasis sains dan teknologi.

**PERKUAT UMKM DAN TEKNOLOGI,
BOGOR SIAP JADI
PIONEER KOTA HALAL**

SERTIFIKAT HALAL

 REPUBLIK INDONESIA (REPUBLIC OF INDONESIA) جمهورية إندونيسيا SERTIFIKAT HALAL (HALAL CERTIFICATE) شهادة الحلال		
Nomor Sertifikat <i>Certificate Number</i>	ID52 [REDACTED] 22	رقم الشهادة
Berdasarkan keputusan penetapan halal produk Majelis Ulama Indonesia nomor : <i>Based on the decree to stipulating halal products of the Indonesian Council of Ulama :</i> استنادا على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات : MUI-SD-0003870701222 Tanggal 28 Desember 2022		
Jenis Produk <i>Type of Product</i>	Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	نوع المنتج
Nama Produk <i>Name of Product</i>	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha <i>Name of Company</i>	[REDACTED]	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha <i>Company's Address</i>	[REDACTED] DESA TANJUNG, KEC. TANJUNG, KAB. LOMBOK UTARA, RT/RW -, TANJUNG, TANJUNG, KAB. LOMBOK UTARA, NUSA TENGGARA BARAT. -, INDONESIA	عنوان الشركة
Diterbitkan di Jakarta pada <i>Issued in Jakarta on</i>	29 Desember 2022	أصدرت الشهادة بجاكرتا في
Berlaku sampai dengan <i>Valid until</i>	29 Desember 2026	سارية المفعول حتى
telah memenuhi ketentuan perundang-undangan <i>Has complied with the provision of laws and regulations</i> قد استوفت أحكام التشريع		
KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY		
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال		
		
Muhammad Aqil Irfham		
Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, BSSN		
		



Lingkungan Kota Bogor. (Sumber: canva.com)

KESIMPULAN

Untuk mewujudkan Bogor sebagai Kota Halal berbasis sains dan teknologi, diperlukan beberapa strategi utama, yaitu penguatan ekosistem riset dan inovasi halal melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri; peningkatan kapasitas serta sertifikasi halal bagi UMKM; pengembangan pariwisata halal berbasis potensi lokal; pemanfaatan teknologi digital dalam layanan dan pengawasan halal; serta pembangunan kemitraan lintas sektor melalui pendekatan triple helix. Strategi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki Bogor sekaligus mengatasi berbagai tantangan dalam pengembangan ekosistem halal yang berkelanjutan.

Secara strategis, pengembangan Kota Halal di Bogor perlu difokuskan pada pembentukan pusat riset dan inovasi halal yang didukung oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian, penguatan UMKM halal melalui pendampingan dan sertifikasi, pengembangan destinasi wisata halal, serta implementasi konsep Smart Halal City berbasis teknologi digital.

Dengan memanfaatkan keunggulan Bogor sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan inovasi, strategi tersebut dapat menjadi fondasi dalam mewujudkan Bogor sebagai model Kota Halal berbasis sains dan teknologi di Indonesia. demikian, keberhasilan pengembangan Kota Halal di Bogor tidak hanya bergantung pada regulasi dan sertifikasi, tetapi juga pada kemampuan mengintegrasikan riset, inovasi, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor dalam satu ekosistem pembangunan yang berkelanjutan.

REFERENSI DAFTAR PUSKATA

- DinarStandard. (2023). State of the Global Islamic Economy Report 2023/24.
- BPJPH. (2023). Laporan Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- Rahman, A. A., et al. (2021). Halal Science and Technology: Current Trends and Future Perspectives.
- Beekun, R. I., & Badawi, J. A. (2005). Balancing Ethical Responsibility among Multiple Organizational Stakeholders: The Islamic Perspective.
- Mastercard & CrescentRating. (2023). Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023.



BATIK KOTA BOGOR

MERANGKAI IDENTITAS, MENGERAKKAN KREATIVITAS

Di setiap goresan motif Batik Kota Bogor tersimpan cerita tentang kota yang kaya akan sejarah, budaya, dan pesona alam. Motif khas seperti Kujang, Talas Bogor, Pakuan Pajajaran, hingga keindahan flora Kebun Raya Bogor menjadikan setiap lembar batik memiliki identitas yang unik. Tak sekadar busana, batik Bogor adalah simbol kebanggaan daerah yang terus dikenakan dari generasi ke generasi.



Strategi Penguatan Hilirisasi Produk Talas

Sebagai Produk Unggulan Daerah Kota Bogor

■ Penulis : Arliyah - Bapperida Kabupaten Belitung Timur



Produk Talas Kota Bogor. (Sumber: canva.com)

Penelitian ini membahas penguatan hilirisasi produk talas sebagai komoditas unggulan Kota Bogor dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Talas telah lama dikenal sebagai produk khas yang diolah menjadi berbagai makanan seperti lapis talas, keripik, dan bolu, yang memiliki daya tarik sebagai oleh-oleh wisata. Namun demikian, pengembangan produk talas masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek hilirisasi, rantai pasok, standardisasi produk, serta pemasaran dan branding.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan analisis data sekunder dari dokumen pemerintah, Badan Pusat Statistik, serta berbagai publikasi ilmiah terkait.

Hasil kajian menunjukkan bahwa potensi talas sebagai produk unggulan belum dioptimalkan akibat keterbatasan teknologi produksi, lemahnya kemitraan antara petani dan pelaku usaha, rendahnya kepemilikan sertifikasi produk, serta belum kuatnya branding kolektif. Penguatan hilirisasi melalui peningkatan kapasitas produksi, integrasi rantai pasok, fasilitasi sertifikasi, dan strategi branding terpadu menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing produk talas. Dengan kebijakan yang terintegrasi, talas berpotensi menjadi penggerak ekonomi lokal berbasis UMKM dan agroindustri di Kota Bogor.

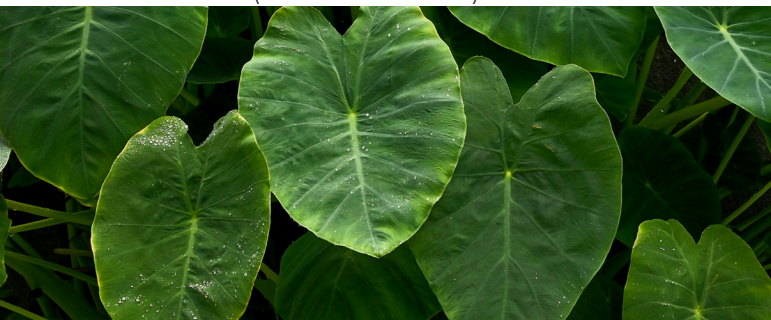
Kata Kunci : Hilirisasi; Talas Bogor; Produk Unggulan Daerah; UMKM; Agroindustri

PENDAHULUAN

Kota Bogor merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat yang memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga kawasan metropolitan Jabodetabek. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor, perekonomian Kota Bogor pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang positif dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,15 persen. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), diikuti oleh sektor Industri Pengolahan yang memiliki peran penting dalam pembentukan nilai tambah ekonomi daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan, industri pengolahan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi penggerak utama perekonomian Kota Bogor. Dalam konteks pembangunan daerah, pengembangan produk unggulan daerah (PUD) menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat identitas dan karakteristik daerah.

Produk unggulan daerah merupakan produk yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, memanfaatkan sumber daya lokal, serta mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat. Pengembangan produk unggulan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah melalui pengolahan, inovasi, pemasaran, dan penguatan kelembagaan usaha. Oleh karena itu, setiap daerah perlu mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki agar mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Daun talas. (Sumber: canva.com)



Salah satu produk yang telah lama dikenal sebagai identitas Kota Bogor adalah talas. Komoditas ini memiliki nilai historis dan kultural yang kuat serta telah berkembang menjadi bahan baku berbagai produk olahan seperti lapis talas, keripik talas, bolu talas, stik talas, dan berbagai makanan ringan lainnya. Produk tersebut tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat lokal, tetapi juga menjadi salah satu oleh-oleh khas yang banyak diminati wisatawan yang berkunjung ke Kota Bogor. Kondisi ini menunjukkan bahwa talas memiliki potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan sebagai produk unggulan daerah berbasis agroindustri dan UMKM (Aqilla, 2022).

Dalam perspektif pembangunan ekonomi daerah, pengembangan komoditas unggulan memerlukan strategi hilirisasi yang terintegrasi. Hilirisasi merupakan proses peningkatan nilai tambah suatu komoditas melalui rangkaian kegiatan yang mencakup pengolahan bahan baku, diversifikasi produk, peningkatan kualitas, pengemasan, standardisasi, sertifikasi, hingga perluasan akses pemasaran.

Tujuan utama hilirisasi adalah mengurangi ketergantungan pada penjualan bahan mentah dan mendorong terciptanya produk bernilai ekonomi lebih tinggi yang mampu meningkatkan pendapatan pelaku usaha serta memperkuat daya saing daerah.

Pada komoditas talas, hilirisasi tidak hanya terbatas pada pengolahan menjadi berbagai produk pangan seperti lapis talas, keripik, dan bolu, tetapi juga mencakup penguatan rantai pasok antara petani dan pelaku usaha, pemenuhan standar mutu dan legalitas produk, serta pembangunan branding yang mampu meningkatkan posisi produk di pasar regional maupun nasional.

Dengan demikian, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong transformasi komoditas talas dari produk pertanian primer menjadi produk agroindustri yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi (Suryana, 2020).

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan talas sebagai produk unggulan daerah di Kota Bogor masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian besar usaha pengolahan talas masih didominasi oleh UMKM dengan keterbatasan teknologi produksi dan kapasitas usaha. Selain itu, rantai pasok antara petani dan pelaku usaha pengolahan belum terintegrasi secara optimal sehingga ketersediaan bahan baku sering mengalami fluktuasi baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Permasalahan lainnya meliputi rendahnya kepemilikan sertifikasi dan legalitas produk, keterbatasan akses pasar modern, serta belum kuatnya branding kolektif “Talas Bogor” sebagai identitas produk unggulan daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi komoditas talas dengan tingkat pengembangannya saat ini. Apabila tidak didukung oleh kebijakan yang tepat, peluang pengembangan talas sebagai penggerak ekonomi lokal akan sulit dioptimalkan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai strategi penguatan hilirisasi produk talas sebagai produk unggulan daerah Kota Bogor guna mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan usaha berbasis talas di Kota Bogor.

PENDEKATAN KAJIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis pengembangan produk talas sebagai produk unggulan daerah di Kota Bogor. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam terkait kondisi hilirisasi, rantai pasok, standardisasi produk, dan pemasaran tanpa melakukan pengujian hipotesis statistik.

Metode yang digunakan adalah studi literatur (library research) dengan dukungan data sekunder. Data yang digunakan dalam kajian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, publikasi statistik, serta hasil penelitian terdahulu.

SUMBER DATA

Sumber data dalam kajian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber utama, yaitu:

1. Dokumen resmi pemerintah daerah, termasuk rencana pembangunan daerah dan laporan perangkat daerah yang menangani UMKM, perdagangan, dan perindustrian.
2. Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor dan BPS Provinsi Jawa Barat yang mencakup data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur ekonomi, serta data sektor UMKM dan industri pengolahan.
3. Jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas hilirisasi, agroindustri, dan pengembangan produk unggulan daerah.
4. Hasil penelitian terdahulu serta laporan kajian akademik terkait komoditas talas dan pengembangan UMKM.
5. Studi kasus dan praktik baik (best practices) pengembangan produk unggulan daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

TEKNIK ANALISIS DATA

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan reduksi data dari berbagai sumber yang relevan.
2. Klasifikasi data berdasarkan tema utama, yaitu hilirisasi, rantai pasok, standardisasi, dan pemasaran.
3. Interpretasi data untuk mengidentifikasi pola permasalahan dan faktor yang memengaruhi pengembangan talas sebagai produk unggulan daerah.
4. Penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis.

Selain itu, digunakan pendekatan analisis kebijakan (policy analysis) untuk menilai kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi ideal dalam pengembangan produk talas, serta merumuskan alternatif kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah.

PERMASALAHAN

Pengembangan talas sebagai produk unggulan Kota Bogor masih menghadapi sejumlah kendala struktural yang saling berkaitan dan berdampak pada rendahnya nilai tambah ekonomi.

1. Proses hilirisasi belum berjalan optimal karena sebagian besar pelaku usaha masih menggunakan teknologi produksi sederhana (Nugroho et al., 2021). Kondisi ini membatasi kapasitas produksi, menjaga konsistensi kualitas, serta menghambat kemampuan untuk memenuhi standar pasar modern.
2. Rantai pasok talas belum terintegrasi dengan baik. Hubungan antara petani dan pelaku usaha pengolahan masih bersifat informal sehingga pasokan bahan baku cenderung tidak stabil, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Ketidakterikatan kontraktual juga menyebabkan fluktuasi harga yang berdampak pada ketidakpastian usaha (Santoso & Widodo, 2020).
3. Aspek standardisasi dan legalitas produk masih menjadi hambatan signifikan. Rendahnya kepemilikan sertifikasi seperti izin edar dan sertifikat halal dipengaruhi oleh keterbatasan informasi, biaya, serta minimnya pendampingan teknis, sehingga membatasi akses ke pasar yang lebih luas (Hidayat & Taufik, 2021).
4. Strategi pemasaran dan branding belum terkoordinasi secara kolektif (Muharam et al., 2023). Promosi masih dilakukan secara individual oleh pelaku usaha sehingga belum membentuk identitas merek "Talas Bogor" yang kuat. Selain itu, pemanfaatan pemasaran digital masih terbatas, terutama pada UMKM berskala kecil.

Secara keseluruhan, permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi komoditas talas dengan tingkat pengembangannya. Tanpa intervensi kebijakan yang terarah dan terintegrasi, pengembangan talas sebagai produk unggulan daerah berisiko tidak berkembang secara optimal dan kehilangan peluang untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.



UMKM produk talas di Kota Bogor. (Sumber: isroi.com)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan talas sebagai produk unggulan memiliki potensi ekonomi yang signifikan, terutama didukung oleh permintaan pasar pada sektor pariwisata dan oleh-oleh khas daerah. Namun, optimalisasi potensi tersebut sangat bergantung pada penguatan empat aspek utama dalam rantai nilai.

1. Meningkatkan Kapasitas Produksi Melalui Adopsi Teknologi Pengolahan

Peningkatan kapasitas produksi melalui adopsi teknologi pengolahan yang lebih modern menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi kualitas produk. Intervensi pemerintah dalam bentuk fasilitasi alat produksi dan pelatihan teknis menjadi krusial untuk mempercepat transformasi ini.

2. Penguatan Rantai Pasok

Penguatan rantai pasok perlu diarahkan pada pembentukan sistem kemitraan yang lebih terstruktur antara petani dan pelaku usaha. Model kemitraan berbasis kontrak atau sentra produksi dapat mengurangi ketidakpastian pasokan sekaligus menstabilkan harga bahan baku.

3. Penguatan Sistem Standardisasi

Penguatan sistem standardisasi diperlukan untuk meningkatkan akses pasar. Dukungan terhadap proses sertifikasi, baik melalui subsidi maupun pendampingan, menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing produk di pasar modern.

4. Penguatan Branding

Penguatan branding kolektif perlu diarahkan pada pembentukan identitas “Talas Bogor” sebagai produk khas daerah. Strategi ini harus didukung oleh promosi terpadu lintas sektor, termasuk pariwisata dan platform digital. Penguatan branding tidak hanya berfokus pada logo atau kemasan, tetapi juga pada pembangunan citra produk yang konsisten, berkualitas, dan memiliki cerita (storytelling) yang melekat pada identitas Kota Bogor. Pengalaman dari beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa penguatan branding yang terintegrasi dengan karakteristik wilayah mampu meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas, seperti pada komoditas kopi di Jawa Barat yang berhasil membangun citra berbasis asal produk (geographical identity) dan meningkatkan nilai jual secara signifikan.

5. Kebijakan Lintas Sektor

Keberhasilan hilirisasi sangat ditentukan oleh integrasi kebijakan lintas sektor yang mampu menyatukan aspek produksi, distribusi, dan pemasaran dalam satu ekosistem pengembangan UMKM. Kebijakan ini perlu melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan sektor pariwisata agar tercipta sistem yang saling mendukung. Pengalaman dari daerah lain menunjukkan bahwa keberhasilan hilirisasi komoditas tidak hanya ditentukan oleh intervensi satu sektor, tetapi melalui sinergi kebijakan yang konsisten. Sebagai contoh, pengembangan kakao di Sulawesi berhasil meningkatkan nilai tambah produk karena adanya integrasi kebijakan antara sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan, yang didukung oleh akses pembiayaan serta peningkatan kapasitas petani dan pelaku usaha.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi kebijakan difokuskan pada langkah operasional yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk mempercepat penguatan hilirisasi produk talas.

Jangka Pendek (0-1 Tahun)

1. Pemerintah daerah perlu memberikan insentif berupa subsidi dan pendampingan dalam proses sertifikasi halal, izin edar, dan standar keamanan pangan untuk memperluas akses pasar UMKM.
2. Program peningkatan kapasitas SDM perlu difokuskan pada pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan digitalisasi pemasaran yang dilakukan secara berkelanjutan dan terukur.

Jangka Menengah (1-3 Tahun)

1. Dinas Pertanian dan Dinas Koperasi dan UMKM perlu memfasilitasi pembentukan kemitraan formal antara petani talas dan pelaku usaha melalui koperasi atau skema kontrak produksi guna menjamin stabilitas pasokan bahan baku.
2. Pengembangan branding kolektif “Talas Bogor” perlu dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan sektor pariwisata, termasuk pemanfaatan digital marketing sebagai media promosi utama

Jangka Panjang (3-5 Tahun)

Pemerintah Kota Bogor melalui dinas terkait perlu membangun fasilitas produksi bersama (shared production facilities) yang dapat diakses UMKM untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk olahan talas.

Pelatihan Terintegrasi UMKM Produktif oleh Dinas KUKMDagin Kota Bogor. (Sumber: solusi.kotabogor.go.id)



KESIMPULAN

Pengembangan talas sebagai produk unggulan Kota Bogor memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM dan agroindustri, namun masih menghadapi tantangan utama pada aspek hilirisasi, integrasi rantai pasok, standardisasi produk, dan penguatan branding. Kajian ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai tambah produk talas tidak hanya ditentukan oleh aspek produksi, tetapi memerlukan penguatan ekosistem usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk dukungan kebijakan lintas sektor yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan penguatan tersebut, talas Bogor berpotensi berkembang menjadi produk agroindustri unggulan yang berdaya saing serta mampu memperkuat identitas Kota Bogor sebagai pusat kuliner khas daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Bogor. (2025). Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Menurut Lapangan Usaha 2020–2024. Kota Bogor: BPS Kota Bogor.
- Aqilla, F. N. (2022). Kajian UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Bogor tahun 2021. *BINA: Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.62389/bina.v1i1.14>
- Hidayat, T., & Taufik, A. (2021). Pengelolaan pascapanen dalam budidaya talas: Menjaga kualitas dan daya simpan produk. *Jurnal Agribisnis dan Teknologi*, 18(2), 120–129.
- Maulidiya, S. E., Suwandi, S. D., Irfany, M. I., et al. (2025). Analisis partisipatif terhadap tantangan dan peluang petani talas di Kabupaten Bogor. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*. <https://doi.org/10.29244/jpim.7.2.271-287>
- Marasabessy, S. A. N., Muhamnu, A. H., & Budiarto, T. (2023). Local economic development and social entrepreneurship after the Covid-19 pandemic. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Bisnis*, 2(1), 145–158. <https://doi.org/10.55927/snimekb.v2i1.4609>
- Muharam, H., Gursida, H., Susilowati, I. H., et al. (2023). Pendampingan digital marketing, media sosial dan modal usaha terhadap forum UMKM Tajur Halang Kabupaten Bogor. *Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 43–52. <https://doi.org/10.31294/abdiekbis.v3i2.2923>
- Nugroho, A., Sari, D. P., & Hidayat, T. (2021). Analisis adopsi teknologi modern pada usaha tani hortikultura. *Jurnal Agribisnis Berkelanjutan*, 15(2), 45–56.
- Purnomo, R., Santika, E., & Dewi, T. (2022). Strategi pertanian berkelanjutan melalui partisipasi generasi muda. *Jurnal Pertanian dan Lingkungan*, 14(3), 102–115.
- Rachman, B., Ananda, R., & Susanti, M. (2022). Potensi dan kendala pengembangan komoditas talas di Kabupaten Bogor. *Indonesian Journal of Agricultural Sciences*, 51(2), 203–216. <https://doi.org/10.7890/ijas.v51i2.5670>
- Santoso, E., & Widodo, A. (2020). Fluktuasi harga dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani: Studi pada komoditas talas di Jawa Barat. *Economic and Agricultural Journal*, 15(3), 223–235. <https://doi.org/10.5678/eaj.v15i3.2345>
- Setyowati, D., Kusumawardani, T., & Sari, R. (2023). Diversifikasi produk talas sebagai strategi pengembangan industri pangan lokal. *Food and Agribusiness Journal*, 18(1), 112–125. <https://doi.org/10.2345/faj.v18i1.4567>
- Suryana, A. (2020). Penguatan hilirisasi dalam pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 45–60.
- Talas Bogor. (Sumber: canva.com)



Dari Kota Hujan ke Kota Cerdas : Implementasi Smart City Kota Bogor

■ Penulis : Arliyah - Bapperida Kabupaten Belitung Timur

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui konsep smart city. Kota Bogor sebagai salah satu kota penyangga ibu kota menerapkan berbagai inovasi untuk mewujudkan transformasi dari “Kota Hujan” menuju kota cerdas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji inovasi pemerintahan Kota Bogor dalam penerapan konsep smart city dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan data primer dan sekunder masih menjadi hambatan implementasi smart city secara optimal. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik, pengembangan command center, dan inovasi transportasi berbasis teknologi telah meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik di Kota Bogor. Namun, tantangan berupa kemacetan, keterbatasan infrastruktur digital, dan rendahnya literasi teknologi. Kesimpulannya, inovasi pemerintahan Kota Bogor berperan penting dalam mendukung terwujudnya kota cerdas yang lebih efektif, modern, dan berkelanjutan.

Kata kunci: smart city, inovasi pemerintahan, Kota Bogor, pelayanan publik



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah dituntut untuk mampu menghadirkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, konsep smart city atau kota cerdas menjadi salah satu pendekatan strategis yang diterapkan oleh berbagai daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan.

Konsep smart city menekankan pemanfaatan teknologi informasi, inovasi, dan integrasi sistem dalam mendukung pengelolaan kota yang lebih modern dan adaptif. Penerapan konsep ini tidak hanya berorientasi pada penggunaan teknologi digital, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik, sistem transportasi yang tertata, lingkungan yang berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembangunan kota cerdas menjadi salah satu solusi dalam menghadapi berbagai persoalan perkotaan yang semakin kompleks akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi.

Di Indonesia, implementasi konsep smart city berkembang cukup pesat seiring meningkatnya tantangan perkotaan, seperti kemacetan lalu lintas, pencemaran lingkungan, keterbatasan infrastruktur, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat dan transparan. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghadirkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan agar pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Salah satu daerah yang aktif mengembangkan konsep kota cerdas adalah Kota Bogor.

Kota Bogor dikenal sebagai “Kota Hujan” karena memiliki curah hujan yang tinggi serta kondisi geografis yang khas. Selain memiliki nilai historis dan budaya yang kuat, Kota Bogor

juga memiliki posisi strategis sebagai salah satu kota penyangga ibu kota dalam kawasan metropolitan Jabodetabek. Tingginya mobilitas masyarakat menjadikan Kota Bogor menghadapi berbagai persoalan perkotaan, seperti kemacetan lalu lintas, peningkatan volume sampah, kebutuhan pelayanan administrasi yang semakin kompleks, serta tantangan pengelolaan lingkungan perkotaan.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Kota Bogor melakukan transformasi tata kelola pemerintahan melalui penerapan berbagai inovasi berbasis teknologi informasi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (electronic government atau e-government) yang memungkinkan pelayanan publik dilakukan secara digital. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan administrasi, seperti perizinan, administrasi kependudukan, pembayaran pajak daerah, dan layanan pengaduan masyarakat secara daring. Digitalisasi pelayanan publik tersebut menunjukkan adanya perubahan pola pelayanan dari sistem konvensional menuju pelayanan berbasis teknologi.

Selain digitalisasi pelayanan publik, Pemerintah Kota Bogor juga mengembangkan pusat kendali kota (command center) sebagai bagian dari implementasi smart city. Pusat kendali ini berfungsi untuk memantau berbagai aktivitas perkotaan secara real-time, seperti kondisi lalu lintas, keamanan wilayah, serta penanganan situasi darurat dan bencana. Pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi tersebut membantu pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kota dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

Dalam bidang transportasi dan lingkungan, Pemerintah Kota Bogor juga melakukan berbagai inovasi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penataan transportasi umum, pengembangan fasilitas pedestrian, serta program penghijauan dan pengelolaan sampah menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan kota yang lebih tertib, nyaman, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pembangunan kota cerdas di Kota Bogor tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada pembangunan lingkungan perkotaan yang sehat dan ramah masyarakat.

Keberhasilan implementasi konsep smart city tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi dan infrastruktur, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bogor berupaya membangun komunikasi publik yang lebih terbuka melalui berbagai platform digital agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, maupun laporan terkait pelayanan publik secara langsung. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan responsif.

Meskipun demikian, implementasi konsep smart city di Kota Bogor masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kemacetan lalu lintas, keterbatasan infrastruktur digital, belum optimalnya integrasi data antarinstansi pemerintah, serta rendahnya literasi digital sebagian masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kota cerdas memerlukan dukungan kebijakan yang berkelanjutan, penguatan sumber daya manusia, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Ilustrasi Smart City. (Sumber: canva.com)



Berbagai penelitian mengenai smart city telah banyak dilakukan, namun kajian yang secara khusus membahas inovasi pemerintahan Kota Bogor dalam perspektif tata kelola pemerintahan daerah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana inovasi pemerintahan diterapkan dalam mendukung transformasi Kota Bogor menuju kota cerdas, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan perkotaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji inovasi pemerintahan Kota Bogor dalam mewujudkan konsep smart city melalui penerapan teknologi informasi, pengembangan pelayanan publik berbasis digital, serta berbagai kebijakan pembangunan perkotaan yang berorientasi pada efektivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.

PENDEKATAN KAJIAN

Kajian mengenai inovasi pemerintahan Kota Bogor dalam mewujudkan konsep smart city menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam proses transformasi pemerintahan daerah melalui penerapan teknologi informasi dan berbagai inovasi pelayanan publik. Metode deskriptif bertujuan menggambarkan fenomena yang terjadi secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan kondisi yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada kebijakan pemerintah daerah, implementasi program kota cerdas, serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik dan kehidupan masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan inovasi daerah. Dengan pendekatan tersebut, penelitian dapat menganalisis hubungan antara teknologi, tata kelola pemerintahan, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung terwujudnya Kota Bogor sebagai kota cerdas yang modern dan berkelanjutan.

SUMBER DATA

Sumber data dalam kajian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan terhadap berbagai inovasi pelayanan publik dan implementasi program smart city yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor. Selain itu, data primer juga dapat diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi terkait kebijakan dan program pemerintah daerah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dokumen resmi pemerintah, peraturan daerah, serta informasi dari situs resmi Pemerintah Kota Bogor yang berkaitan dengan konsep kota cerdas dan inovasi pemerintahan. Penggunaan data sekunder bertujuan untuk memperkuat analisis serta memberikan landasan teoritis yang relevan terhadap kajian yang dilakukan. Dengan memanfaatkan kedua sumber data tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pembahasan yang objektif, sistematis, dan sesuai dengan fakta yang terjadi dalam pelaksanaan inovasi pemerintahan di Kota Bogor.

PERMASALAHAN

Meskipun Pemerintah Kota Bogor telah melakukan berbagai inovasi dalam penerapan konsep smart city, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Berbagai permasalahan tersebut berkaitan dengan aspek transportasi, infrastruktur teknologi, lingkungan, sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung transformasi kota cerdas.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi Kota Bogor adalah kemacetan lalu lintas. Sebagai salah satu kota penyangga Jakarta dalam kawasan metropolitan Jabodetabek, Kota Bogor memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang tersedia sehingga menyebabkan kepadatan lalu lintas, terutama pada jam sibuk dan akhir pekan.

Kondisi tersebut tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada meningkatnya polusi udara dan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan.

Selain persoalan transportasi, penerapan layanan berbasis digital juga masih menghadapi kendala dalam aspek literasi teknologi masyarakat. Tidak seluruh masyarakat memiliki kemampuan dan akses yang memadai dalam memanfaatkan layanan digital yang disediakan pemerintah daerah. Sebagian masyarakat, khususnya kelompok lanjut usia dan masyarakat dengan keterbatasan akses internet, masih mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan administrasi berbasis daring. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan sistem digital belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan integrasi data antarinstansi pemerintahan. Implementasi smart city membutuhkan sistem data yang terintegrasi agar pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala koordinasi antarorganisasi perangkat daerah sehingga pertukaran data dan informasi belum sepenuhnya optimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi juga menjadi hambatan dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis digital.

Kemacetan di Kota Bogor. (sumber: sindonews.com)



Di bidang lingkungan, Kota Bogor menghadapi tantangan terkait pengelolaan sampah, drainase, dan potensi banjir. Pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas perkotaan menyebabkan volume sampah terus meningkat setiap tahun. Di sisi lain, curah hujan yang tinggi menjadikan beberapa wilayah rawan mengalami genangan apabila sistem drainase tidak berfungsi secara optimal. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kota cerdas tidak hanya membutuhkan dukungan teknologi, tetapi juga pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan partisipasi aktif masyarakat.

Selain faktor teknis, keberhasilan implementasi smart city juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai platform digital untuk komunikasi publik, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum aktif memanfaatkan layanan tersebut. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi maupun pengawasan terhadap pelayanan publik menyebabkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat belum berjalan secara maksimal.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi konsep smart city di Kota Bogor masih memerlukan penguatan kebijakan, peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait agar transformasi Kota Bogor menuju kota cerdas dapat berjalan secara optimal, inklusif, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Kota Bogor menuju kota cerdas menunjukkan adanya perubahan dalam sistem tata kelola pemerintahan yang semakin modern dan berbasis teknologi informasi. Penerapan konsep smart city dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas birokrasi, serta mengatasi berbagai persoalan perkotaan.

Dalam implementasinya, pembangunan kota cerdas di Kota Bogor dapat dianalisis melalui beberapa dimensi utama, yaitu smart governance, smart mobility, smart environment, dan smart people.

1. Smart Governance

Dimensi smart governance terlihat dari penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) dalam pelayanan publik. Pemerintah Kota Bogor mengembangkan berbagai layanan administrasi digital yang memungkinkan masyarakat mengakses pelayanan secara daring, seperti perizinan, administrasi kependudukan, pembayaran pajak daerah, dan layanan pengaduan masyarakat. Digitalisasi pelayanan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat karena proses administrasi menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan.

Penerapan sistem digital juga membantu meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Proses pelayanan yang dilakukan secara elektronik dapat dipantau secara lebih terbuka sehingga mengurangi praktik birokrasi yang tidak efisien. Selain itu, pengelolaan data masyarakat menjadi lebih terstruktur dan mendukung proses pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif dan modern.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kota Bogor juga mengembangkan pusat kendali kota (command center). Sistem ini berfungsi untuk memantau berbagai aktivitas perkotaan secara real-time, seperti kondisi lalu lintas, keamanan wilayah, dan situasi darurat. Melalui integrasi data dan teknologi pengawasan, pemerintah dapat mengambil keputusan secara lebih cepat dan efektif dalam menangani persoalan perkotaan.

2. Smart Mobility

Permasalahan kemacetan menjadi salah satu tantangan utama Kota Bogor sebagai kota penyangga kawasan metropolitan Jabodetabek. Tingginya mobilitas masyarakat dan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor menyebabkan kepadatan lalu lintas masih sering terjadi, terutama pada jam sibuk dan akhir pekan.

Dalam mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Bogor melakukan berbagai inovasi di bidang transportasi. Upaya yang dilakukan antara lain penataan jalur transportasi umum, pengembangan fasilitas pedestrian, dan penerapan sistem informasi lalu lintas berbasis teknologi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas mobilitas masyarakat serta menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib, aman, dan nyaman.

Meskipun kemacetan belum dapat diatasi sepenuhnya, penerapan konsep smart mobility menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam membangun sistem transportasi perkotaan yang lebih modern dan berkelanjutan. Pengembangan transportasi berbasis teknologi juga menjadi langkah penting dalam mendukung efisiensi aktivitas masyarakat dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Lapangan Sempur Kota Bogor. (Sumber: tripadvisor.com)



3. Smart Environment

Pembangunan kota cerdas di Kota Bogor tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Sebagai kota dengan curah hujan tinggi, Bogor menghadapi tantangan terkait pengelolaan sampah, drainase, dan potensi banjir. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan kota dan kelestarian lingkungan.

Berbagai program dilakukan, seperti penyediaan ruang terbuka hijau, penghijauan kota, serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui edukasi dan program pengelolaan sampah terpadu. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kota cerdas tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi pemerintahan, tetapi juga menciptakan lingkungan perkotaan yang sehat dan nyaman.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan lingkungan turut membantu pemerintah dalam melakukan pemantauan kondisi kota dan penanganan persoalan lingkungan secara lebih cepat. Dengan demikian, konsep smart environment menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.



Acara Smart City Talk Kota Bogor.

4. Smart People dan Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan implementasi smart city sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam mendukung program pemerintah daerah. Pemerintah Kota Bogor berupaya membangun komunikasi publik yang lebih terbuka melalui berbagai platform digital sebagai sarana penyampaian aspirasi, kritik, dan laporan masyarakat.

Kehadiran layanan pengaduan berbasis digital membantu pemerintah mengetahui berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan secara lebih cepat. Selain itu, masyarakat menjadi lebih mudah mengakses informasi terkait kebijakan dan pelayanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan digital masih menghadapi kendala, terutama terkait rendahnya literasi digital pada sebagian masyarakat. Kelompok lanjut usia dan masyarakat dengan keterbatasan akses internet masih mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan berbasis teknologi. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan literasi digital menjadi langkah penting agar implementasi kota cerdas dapat berjalan secara lebih inklusif.

5. Tantangan Implementasi Smart City

Meskipun berbagai inovasi telah dilakukan, implementasi konsep smart city di Kota Bogor masih menghadapi sejumlah tantangan. Permasalahan utama meliputi kemacetan lalu lintas, keterbatasan infrastruktur digital, belum optimalnya integrasi data antarinstansi pemerintah, serta keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.

Selain itu, pengembangan sistem pemerintahan berbasis digital membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah yang lebih kuat. Tanpa integrasi sistem yang baik, pelayanan publik belum dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus melakukan evaluasi dan pengembangan inovasi secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implementasi konsep smart city di Kota Bogor menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi telah membantu pemerintah menciptakan pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, transformasi Kota Bogor menuju kota cerdas menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kota yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

REKOMENDASI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil kajian mengenai inovasi pemerintahan Kota Bogor dalam mewujudkan konsep smart city, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mendukung efektivitas pembangunan kota cerdas secara berkelanjutan.

1. Penguatan Infrastruktur Digital

Pemerintah Kota Bogor perlu meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, termasuk jaringan internet, sistem data terintegrasi, dan fasilitas digital di ruang publik. Integrasi data antarorganisasi perangkat daerah penting dilakukan agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, efektif, dan akurat.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pemerintah perlu meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara melalui pelatihan di bidang teknologi informasi, pengelolaan data, dan pelayanan digital. Selain itu, edukasi literasi digital kepada masyarakat juga perlu diperluas agar seluruh lapisan masyarakat mampu memanfaatkan layanan berbasis teknologi secara optimal.

3. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat perlu terus ditingkatkan melalui penyediaan platform komunikasi publik yang mudah diakses, responsif, dan transparan. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan, evaluasi, dan penyampaian aspirasi terkait pelayanan publik sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang partisipatif.

4. Pengembangan Transportasi dan Lingkungan Berkelanjutan

Pemerintah Kota Bogor perlu melanjutkan pengembangan transportasi umum yang modern dan ramah lingkungan, serta memperluas fasilitas pedestrian dan ruang terbuka hijau. Program pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pengendalian banjir juga perlu diperkuat untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang sehat dan berkelanjutan.

5. Evaluasi dan Inovasi Berkelanjutan

Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap program smart city yang telah diterapkan. Perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah menuntut pemerintah untuk terus menghadirkan inovasi pelayanan publik yang adaptif, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut, Kota Bogor diharapkan mampu memperkuat implementasi smart city serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, inklusif, dan berdaya saing.

KESIMPULAN

Transformasi Kota Bogor dari “Kota Hujan” menuju “Kota Cerdas” menunjukkan upaya nyata pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Penerapan konsep smart city melalui sistem e-government telah mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi secara lebih cepat, mudah, dan transparan. Selain itu, pengembangan command center membantu pemerintah memantau kondisi kota secara real-time sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih efektif dan responsif.

Inovasi juga dilakukan pada sektor transportasi dan lingkungan melalui penataan transportasi umum, pengembangan fasilitas pedestrian, program penghijauan, serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kota cerdas tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan.

Namun, implementasi smart city di Kota Bogor masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kemacetan lalu lintas, keterbatasan infrastruktur digital, belum optimalnya integrasi data antarinstansi, serta rendahnya literasi digital sebagian masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan kota cerdas memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta partisipasi aktif masyarakat.

Secara keseluruhan, inovasi pemerintahan Kota Bogor menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih efektif, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan komitmen pemerintah dan pengembangan inovasi yang berkelanjutan, Kota Bogor memiliki potensi menjadi kota cerdas yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.

Mengawal Transparansi & Partisipasi Publik

Advokasi Kebijakan melalui Implementasi Program Review di Kota Bogor Tahun 2026

■ Penulis : Irma Arlini Dewi, S.T.P., M.Sc. - Bapperida Kota Bogor & Fuadi Hanif, S.Stat. - Kemendagri



Program Review Kebijakan Kota Bogor.

Kota Bogor mencatatkan langkah progresif dalam tata kelola pemerintahan dengan mengadopsi metode "Program Review" sebagai alat evaluasi kebijakan yang partisipatif. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Paseban Sri Baduga, pada tanggal 8 April 2026 ini, menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi Masyarakat. Kegiatan ini merupakan Kerjasama BSKDN Kemendagri melalui Pusat Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik dengan Pemerintah Kota Bogor melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor, dengan dibantu oleh perangkat daerah terkait.

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi metode yang mereplikasi konsep Sortir Program dari Jepang ini pada dua proyek

percontohan, yaitu Program Pelatihan UMKM dan Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Daerah. Evaluasi melibatkan qualitative judgement sampling melalui 30 warga penilai dari 6 kecamatan yang bertindak sebagai "hakim" kebijakan. Hasil rekapitulasi dari 29 warga yang hadir menunjukkan mayoritas menilai kedua program tersebut masih memerlukan perbaikan. Catatan kritis warga berfokus pada minimnya sosialisasi lapangan dan perlunya pendampingan lanjutan untuk UMKM, serta pentingnya akurasi data kemiskinan dan mitigasi dampak penonaktifan keanggotaan PBI. Program ini menyimpulkan bahwa pelibatan aktif masyarakat mampu mendorong efisiensi anggaran, transparansi, serta mewujudkan pembangunan yang berpusat pada masyarakat (people-centered development).

Kata Kunci : Program Review, Partisipasi Publik, Evaluasi Kebijakan, Tata Kelola Pemerintahan

LATAR BELAKANG

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan, termasuk dalam proses evaluasi anggaran daerah. Selama ini, evaluasi terhadap program-program pemerintah daerah cenderung bersifat internal birokrasi, formalitas administratif, dan berfokus pada penyerapan anggaran secara kuantitatif (*output-oriented*). Akibatnya, muncul permasalahan mendasar di mana program yang dijalankan secara rutin tahunan sering kali tidak dievaluasi secara kritis dari sudut pandang penerima manfaat langsung. Hal ini berpotensi memicu ketidakefektifan alokasi anggaran dan ketidaktepatan sasaran program di lapangan.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Pemerintah Kota Bogor mengambil langkah progresif pada tahun 2026 dengan mengadopsi metode "Program Review". Metode ini direplikasi dari konsep sukses "*Sortir Program*" (*Jigyo Shiwake*) yang dikembangkan oleh lembaga pemikir *Koso Nippon* di Jepang sejak tahun 2002.

Urgensi dari artikel ini terletak pada pentingnya mendokumentasikan serta menganalisis transformasi instrumen evaluasi kebijakan di Indonesia, di mana masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai objek pasif pembangunan, melainkan sebagai "hakim" yang memberikan penilaian kualitatif mendalam (*qualitative judgement sampling*) terhadap kinerja program daerah. Kota Bogor menjadi lokus krusial sebagai kota pertama di tahun 2026 yang menerapkan advokasi kebijakan ini dengan dukungan penuh dari Anggaran BSKDN Kemendagri.

Permasalahan nyata yang diangkat dalam evaluasi ini berfokus pada dua sektor fundamental yang menyerap anggaran besar dan bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak, yaitu sektor ekonomi melalui Program Pelatihan UMKM oleh Dinas KUKMDagin dan sektor kesehatan melalui Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Daerah oleh Dinas Kesehatan.

Kedua program rutin ini diuji secara kritis untuk memetakan kendala teknis dan sosial, seperti minimnya sosialisasi lapangan berbasis non-digital, keterbatasan pendampingan usaha lanjutan, hingga problem akurasi data kemiskinan warga kurang mampu.

Oleh karena itu, penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses implementasi metode Program Review berjalan sebagai instrumen advokasi kebijakan di Kota Bogor. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk memaparkan poin-poin kritis hasil penilaian objektif masyarakat serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) demi mewujudkan efisiensi anggaran daerah, peningkatan kapasitas aparat, dan pembangunan pelayanan publik yang berpusat pada masyarakat (*people-centered development*).

Masyarakat peserta Program Review Kota Bogor.



MENGENAL “PROGRAM REVIEW”: INOVASI DARI NEGERI SAKURA

Konsep “Program Review” ini mengadopsi secara langsung sistem “Sortir Program” yang sukses diterapkan di Jepang oleh lembaga pemikir Koso Nippon, sebagaimana tertuang dalam panduan teknis evaluasi kebijakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri. Sejak tahun 2002, metode ini telah membantu 126 pemerintah daerah di Jepang melakukan penghematan anggaran hingga 8 Triliun Yen dengan cara menyeleksi program yang tidak efisien dan memperbaiki sistem administrasi.

Program review ini kemudian diadopsi oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri untuk melakukan evaluasi program-program pemerintah di Indonesia dengan melibatkan masyarakat sebagai penilai program. Sejak tahun 2022 hingga 2025, uji coba pelaksanaan Program Review di berbagai daerah seperti Bantul, Surabaya, dan Sinjai difasilitasi dan didampingi oleh Koso Nippon sebelum akhirnya diterapkan di Kota Bogor pada tahun 2026.

Kota Bogor merupakan Kota Pertama yang menjadi lokus pelaksanaan kegiatan Advokasi Kebijakan melalui Implementasi Program Review di tahun 2026 yang dibiayai sepenuhnya oleh Anggaran BSKDN Kemendagri, dengan tetap melibatkan Koso Nippon sebagai pendamping.

Program yang dipilih adalah program yang memiliki anggaran besar, dilaksanakan secara rutin, memiliki dampak yang besar bagi Masyarakat dan atau program yang menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan hasil diskusi dengan perangkat daerah terkait dan Tim BSKDN dan Koso Nippon sebagai pendamping, maka terpilih 2 program yaitu Pelatihan UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas KUKMDagin dan Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Pemda yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Program Pelatihan UMKM dievaluasi untuk melihat dampaknya pada para pelaku usaha dan efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor, sementara Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Pemda dievaluasi untuk meninjau ketepatan sasaran dan kualitas layanan kesehatan bagi warga kurang mampu.

Pelaksanaan Program Review Kota Bogor dihadiri oleh Pemangku Kepentingan terkait.



MASYARAKAT SEBAGAI "HAKIM" KEBIJAKAN

Hal yang membedakan "Program Review" dari evaluasi internal birokrasi adalah keterlibatan langsung Masyarakat. Dalam pelaksanaannya di Kota Bogor, sebanyak 30 orang warga penilai dipilih secara acak dari 6 kecamatan untuk memberikan penilaian subjektif namun jujur terhadap program pemerintah. Pemilihan warga penilai ini dilaksanakan di setiap Kecamatan di Kota Bogor, dibantu oleh aparat wilayah (kecamatan dan kelurahan) dan dengan memperhitungkan keterwakilan kelompok masyarakat secara proporsional. Meskipun secara statistik kuantitatif ukuran ini belum representatif, pemilihan 30 warga tersebut mengikuti standar praktik Program Review di Jepang yang memang menekankan pada penggunaan ukuran sampel kecil namun mendalam atau dikenal dengan istilah *qualitative judgement sampling*.

Adapun proporsi keterwakilan tersebut mencakup kelompok masyarakat pelaku usaha/UMKM sebanyak 1 orang, kelompok masyarakat penerima manfaat program PBI Pemda sebanyak 1 orang, dan kelompok masyarakat umum sebanyak 3 orang. Melalui komposisi ini, diperoleh 5 warga penilai dari masing-masing kecamatan dengan total seluruhnya berjumlah 30 warga penilai.

Sumber data yang digunakan untuk memilih warga penilai berasal dari perangkat daerah terkait, yaitu Dinas KUKMDagin untuk data pelaku UMKM, Dinas Kesehatan untuk data penerima manfaat PBI Pemda dan data Pemilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk data kelompok Masyarakat umum. Dalam kegiatan Program Review ini, Masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan atau sekadar sumber data, melainkan ditempatkan sebagai "penentu" atau hakim yang menilai apakah sebuah program layak dilanjutkan, perlu diperbaiki, atau justru harus dihentikan. Melalui keterlibatan 30 warga penilai yang dipilih secara acak, Pemkot Bogor mendapatkan perspektif yang jujur dan objektif terkait dampak dan manfaat implementasi program/kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas KUKMDagin dan Dinas Kesehatan.

Dalam menjalankan peran sebagai hakim, Masyarakat dibekali oleh Lembar Informasi Program (LIP) yang telah disiapkan oleh dinas pengampu program sejak sepekan sebelum hari dilaksanakannya proses penilaian. Masyarakat terpilih juga dihimbau untuk menambah informasi secara mandiri selama waktu tersebut dengan mencari informasi sekunder lainnya dari lingkungan sekitar, media, maupun sarana informasi lainnya. Pada hari penilaian, masyarakat terpilih juga diberikan kesempatan untuk memperhatikan pemaparan disertai dialog interaktif dengan Dinas Pengampu Program, sehingga masyarakat terpilih telah memiliki informasi yang cukup untuk memberikan penilaian yang objektif.

SINERGI ANTAR-LEMBAGA

Kesuksesan implementasi ini didukung oleh kolaborasi lintas sektor. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri bertindak sebagai fasilitator teknis dan, Koso Nippon sebagai pendamping sekaligus pengamat, sementara Pemkot Bogor menyiapkan panitia pelaksana dari unsur Bapperida, Diskominfo, dan Disdukcapil serta aparat wilayah kecamatan dan kelurahan untuk menghubungi 30 warga penilai. Evaluasi juga melibatkan pihak luar yang objektif, seperti perwakilan dari Kementerian UMKM, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, hingga tokoh masyarakat seperti Ketua PWI Kota Bogor, akademisi dan praktisi ekonomi sebagai evaluator program.

PERAN STRATEGIS BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH BAPPERIDA

Dalam implementasi ini, Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Bapperida memegang peranan sentral sebagai penggerak utama. Sesuai tugas dan fungsinya, bidang ini melakukan analisis kelayakan inovasi dan mensintesis masukan masyarakat menjadi data kualitatif yang valid. Hasil penilaian dari warga tidak hanya berhenti sebagai laporan, tetapi diolah menjadi rekomendasi kebijakan berbasis bukti (**evidence-based policy**) untuk perbaikan program di masa depan.

REKAPITULASI HASIL: SUARA WARGA DAN EVALUATOR

Program Review memiliki prinsip “diskusi dengan hasil yang jelas”, warga diharuskan memberikan penilaian konkret melalui 3 pilihan jawaban yang disertai saran dan catatan apakah program sudah baik, program perlu diperbaiki, atau program sebaiknya dihentikan. Berdasarkan hasil rekapitulasi Program Review terhadap dua pilot project kebijakan, yaitu Program Pelatihan UMKM dan Program PBI Jaminan Kesehatan Pemda, hadir sejumlah 29 dari 30 warga terpilih dan telah melakukan penilaian dengan mayoritas warga penilai menyatakan bahwa program perlu diperbaiki. Berikut adalah poin-poin kritis yang dirangkum

1. Program Pelatihan UMKM (Dinas KUKMDagin)

Berdasarkan hasil rekapitulasi form penilaian pada saat pelaksanaan Program Review tersebut, sejumlah **27 dari 29 warga (93.10%)** memberikan penilaian **program perlu diperbaiki** dan **2 warga lainnya (6.90%)** menilai **program sudah baik**. Secara umum, warga mengapresiasi keberadaan dan program ini, namun mencatat beberapa kelemahan mendasar:

1. Minimnya Sosialisasi: Sosialisasi yang dilakukan cenderung berbasis sosialisasi digital. Ada kekhawatiran bahwa program hanya menyentuh pelaku UMKM yang melek digital. Perlu ada tim investigasi lapangan untuk menjangkau pelaku usaha kecil yang belum tersentuh teknologi, sehingga peserta pelatihan tidak hanya ‘itu-itu’ saja.
2. Pendampingan Lanjutan : Warga dan evaluator menganggap bahwa fokus program masih terbatas pada jumlah pelatihan belum sampai melihat progres perkembangan dari UMKM yang dilatih. Diperlukan monitoring intensif 3-6 bulan dan pendampingan UMKM untuk bisa terhubung ke akses modal dan akses pasar (market linkage) agar lebih mandiri dan naik kelas.

3. Satu Data UMKM : Salah seorang Evaluator menyarankan pembangunan basis data UMKM tunggal yang digunakan bersama oleh seluruh OPD agar program peningkatan kapasitas bisa dilakukan secara terintegrasi atau “dikeroyok” bersama.

2. Program PBI Jaminan Kesehatan Pemda (Dinas Kesehatan)

Pada saat pelaksanaan Program Review, sejumlah **22 dari 29 warga (75.86%)** memberikan penilaian **program perlu diperbaiki** dan **7 warga lainnya (24.14%)** menilai **program sudah baik**. Program ini dinilai sangat membantu warga miskin, namun memiliki tantangan besar pada aspek teknis:

1. Akurasi dan Transparansi Data : Warga menyoroti perlunya validasi data agar bantuan tepat sasaran. Muncul usulan untuk menerbitkan daftar penerima PBI di tingkat RT/RW sebagai bentuk “koreksi sosial”.
2. Sosialisasi Kriteria : Masyarakat masih bingung mengenai status “Desil” (kelas sosial) yang menentukan kelayakan bantuan. Perlu sosialisasi masif mengenai aplikasi pendukung (seperti aplikasi SOLID) dan kolaborasi yang lebih kuat antara Dinkes, Disdukcapil, serta pihak kelurahan.
3. Mitigasi Sosial : Kurangnya sosialisasi terkait pemutakhiran data PBI disertai kurangnya mitigasi sosial atas ketidak-tahuan masyarakat oleh Pemda dapat berpotensi menjadi gejolak sosial yang mengkhawatirkan. Perlu disiapkan langkah-langkah tepat khususnya dalam penonaktifan keanggotaan kepada masyarakat agar tidak terjadi “Shock Policy Effect”.

**EVALUASI WARGA MENUNJUKKAN
BAHWA KUALITAS IMPLEMENTASI
MENJADI KUNCI
KEBERHASILAN PROGRAM**

DAMPAK DAN HARAPAN KE DEPAN

Melalui advokasi kebijakan ini, Kota Bogor diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan utama:

1. Efisiensi Anggaran: Memastikan anggaran dialokasikan pada program yang benar-benar bermanfaat
2. Peningkatan Kapasitas Aparat: Mendorong dinas pengampu (seperti Dinas KUKMDagin dan Dinas Kesehatan) untuk lebih transparan dan mampu menjelaskan program dengan bahasa yang mudah dipahami warga
3. Kepercayaan Publik : Memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga melalui keterbukaan informasi dan pelibatan aktif

Dengan implementasi Program Review, Kota Bogor tidak hanya mengejar angka-angka administratif, tetapi bergerak menuju pelayanan publik yang lebih berpusat pada masyarakat (people-centered development)

KESIMPULAN

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas, proses pelaksanaan, serta hasil dari keterlibatan publik dalam evaluasi kebijakan daerah melalui metode Program Review di Kota Bogor tahun 2026. Berdasarkan kajian tersebut, implementasi Program Review terbukti bukan sekadar formalitas administratif, melainkan wujud nyata dari keberanian pemerintah daerah dalam membuka ruang transparansi anggaran dan mendengarkan kritik langsung dari masyarakat. Melalui sintesis rekomendasi dari para pakar serta evaluasi objektif dari warga, Kota Bogor kini memiliki landasan kuat untuk menyusun kebijakan berbasis bukti demi menciptakan pelayanan publik yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat (people-centered development).

DAFTAR PUSTAKA

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri. (2024). Buku Panduan Program Review. Jakarta: BSKDN Kemendagri.



Penjelasan Program Review oleh narasumber.



BOGOR INNOVATION AWARD 2026

SPARK YOUR IDEA:
INNOVATION AND COLLABORATION EMPOWERING THE FUTURE

REGISTER
NOW!

Ayo Ikuti dan Menangkan

Kategori Lomba



Nyanyi



Tari Modern



Tari Tradisional



Cosplay



Fotografi

Hadiah

- Uang Tunai
- Piala
- Sertifikat

Tahapan Lomba



TOTAL HADIAH

Rp **35.000.000**

Kunjungi & daftar melalui:

<https://bia.kotabogor.go.id>

SCAN ME



Organized by:

THREE
Entertainment

Pengertian

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

(UU No.14 Tahun 2008 Pasal 1 Nomor 2)

Tahukah Kamu ???

Setiap tahun, Komisi Informasi Pusat mengadakan penilaian & pemberian penghargaan kepada badan publik yang paling informatif. Hal ini mendorong badan publik semakin transparan kepada masyarakat loh!

Informasi Publik

Kategori Informasi Publik

Secara substansi, kategori informasi publik yang dimiliki badan publik dan diatur UU No.14 Tahun 2008 meliputi:

1

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara Berkala



2

Informasi Publik yang wajib diumumkan secara Serta Merta



3

Informasi Publik yang wajib tersedia Setiap Saat



4

Informasi Publik yang Dikecualikan



DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008**
tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010**
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3 Peraturan Komisi Informasi No. 1 / 2021**
tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 2017**
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah.
- 5 Peraturan Walikota No. 70 Tahun 2022**
tentang standar layanan informasi publik

Standar Pelayanan Permohonan Informasi Dan Dokumentasi

PERSYARATAN PELAYANAN

- 1** Pemohon informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia di meja pelayanan atau situs web **ppidkotabogor.go.id**.
- 2** Persyaratan administrasi: menyertakan identitas diri (KTP), bagi pemohon informasi atas nama perorangan; atau;
- 3** Menyertakan akte pengesahan badan hukum organisasi/lembaga, bagi pemohon informasi atas nama organisasi/lembaga



Prosedur Pelayanan

Sistematika prosedur pelayanan:

1

Pemohon mengisi formulir permohonan informasi di meja pelayanan atau melalui situs web bapperida.kotabogor.go.id/permohonan-informasi



2

Petugas pelayanan meregister permohonan yang sudah memenuhi syarat dan kemudian diserahkan ke Ketua PPID



3

Ditanggapi permohonan informasi 10 hari + 7 hari kerja

Pemohon mengajukan berkas yang akan diverifikasi oleh petugas PPID. Setelah verifikasi, data yang dibutuhkan dicari dan diolah untuk kemudian disusun menjadi jawaban. Surat jawaban diserahkan paling lambat 10 hari kerja, dapat diperpanjang 7 hari kerja jika PPID belum menguasai informasi yang diminta.



BIAYA

GRATIS

Tanpa dipungut Biaya



WAKTU PELAYANAN

Senin–Kamis
07.30 - 15.30 WIB

Istirahat
12.00 - 13.00 WIB

Khusus Jumat
07.30 - 16.00 WIB

Istirahat
11.30 - 13.00 WIB



JAMINAN PELAYANAN

Terlayannya permohonan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008



www.bapperida.kotabogor.go.id



@bapperida.kotabogor

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Prosedur Pelayanan Informasi Publik



LAYANAN PERMOHONAN **DATA & INFORMASI** ke Bapperida Kota Bogor

SCAN DISINI



<https://bit.ly/req-data-bapperida>



**DATA
AKURAT**

Sumber resmi
dan terpercaya



**PELAYANAN
MUDAH**

Proses cepat
dan transparan



**AMAN &
TERJAMIN**

Data terjaga
kerahasiaannya



**LAYANAN
RESPONSIF**

Siap melayani
kebutuhan Anda



www.bapperida.kotabogor.go.id



[@bapperida.kotabogor](https://www.instagram.com/bapperida.kotabogor)

HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

BAPPERIDA KOTA BOGOR

— TRIWULAN I TAHUN 2026 —

96,45

**PREDIKAT
“SANGAT BAIK”**

**NO
CORRUPTION**

**STOP
CORRUPTION**



INTEGRITAS

Menjunjung tinggi kejujuran dan etika.



TRANSPARAN

Terbuka dalam setiap proses dan informasi.



AKUNTABEL

Bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan.



MELAYANI

Memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.



www.bapperida.kotabogor.go.id



@bapperida.kotabogor.

HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

BAPPERIDA KOTA BOGOR

— TRIWULAN I TAHUN 2026 —

PREDIKAT

“SANGAT BAIK”

HASIL SPAK



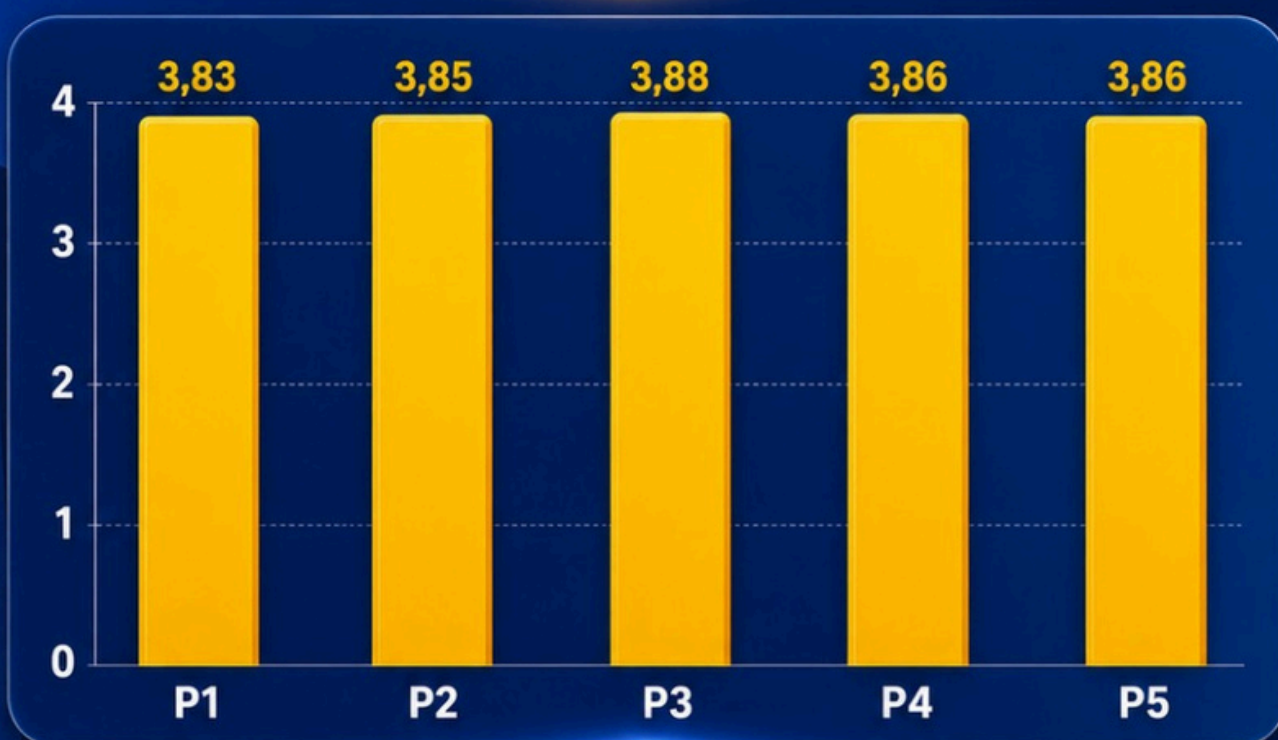
INDEKS SPAK



**JUMLAH
RESPONDEN**

148

HASIL INDEKS PER-INDIKATOR PENILAIAN SPAK BAPPERIDA



P1 : Ada/Tidaknya Diskriminasi Layanan

P2 : Ada/Tidaknya Layanan Diluar Prosedur

P3 : Ada/Tidaknya Imbalan Uang/Barang/Fasilitas di Luar Ketentuan

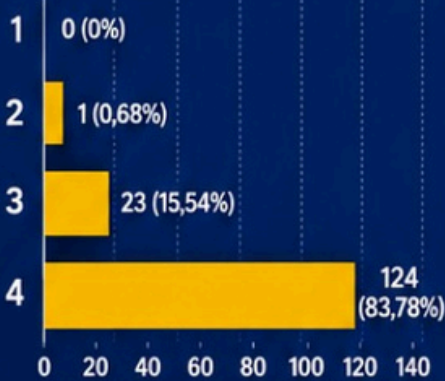
P4 : Ada/Tidaknya Pungutan Liar

P5 : Ada/Tidaknya Percaloan

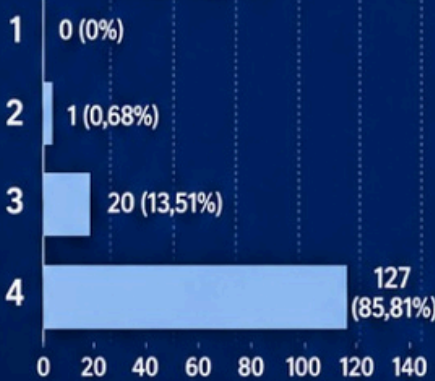
DETAIL HASIL INDEKS PER-INDIKATOR SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI



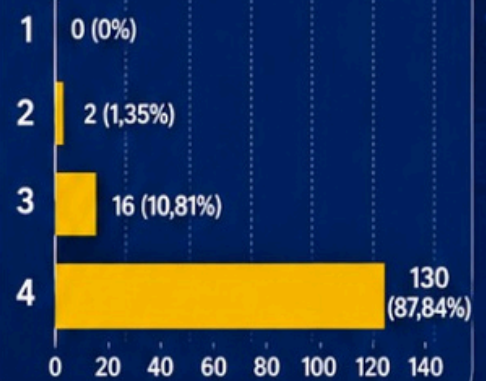
ADA/TIDAKNYA DISKRIMINASI LAYANAN



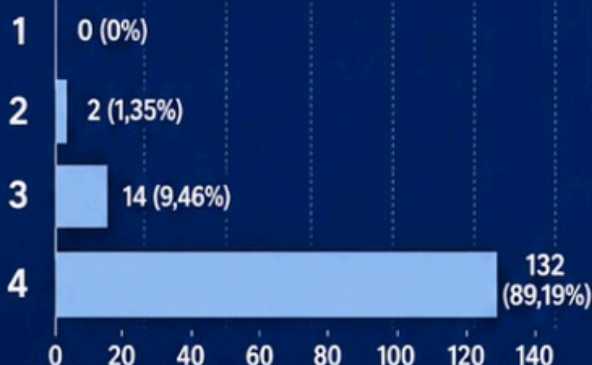
ADA/TIDAKNYA LAYANAN DILUAR PROSEDUR



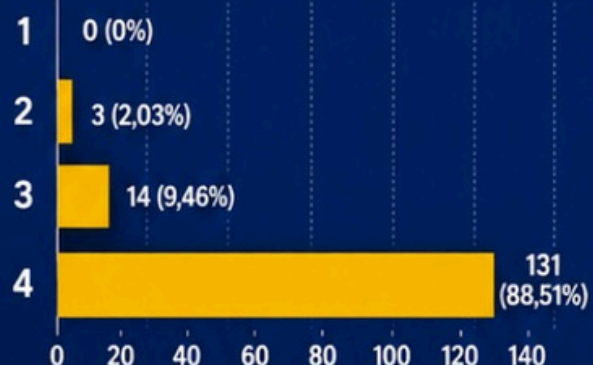
ADA/TIDAKNYA PUNGUTAN LIAR



ADA/TIDAKNYA IMBALAN UANG/BARANG/FASILITAS DI LUAR KETENTUAN



ADA/TIDAKNYA PERCALOAN



*Bobot : 1 - 4



*Jumlah Responden :
148 Orang

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT ke Bapperida Kota Bogor

SCAN DISINI



<https://bit.ly/pengaduan-bapperida>



RESPON CEPAT

Setiap laporan ditindaklanjuti secara cepat



MUDAH & PRAKTIS

Sampaikan laporan kapan saja dan di mana saja



DATA AMAN & TERJAMIN

Kerahasiaan data pelapor selalu terjaga



BOGOR LEBIH BAIK

Partisipasi Anda mewujudkan Bogor yang maju



www.bapperida.kotabogor.go.id



@bapperida.kotabogor

”

Masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi 'hakim' yang menilai kualitas program pemerintah.

IRMA ARLINI DEWI, S.T.P., M.SC. (BAPPERIDA KOTA BOGOR) DAN FUADI HANIF, S.STAT. (KEMENDAGRI)



Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor

Jl. Kapten Muslihat No. 21, RT.01/RW.01, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121
Telepon: (0251) 8338052 | Website: <http://bapperida.kotabogor.go.id> | Email: bapperida@kotabogor.go.id | Instagram: [@bapperida.kotabogor](https://www.instagram.com/bapperida.kotabogor)